

BULETIN

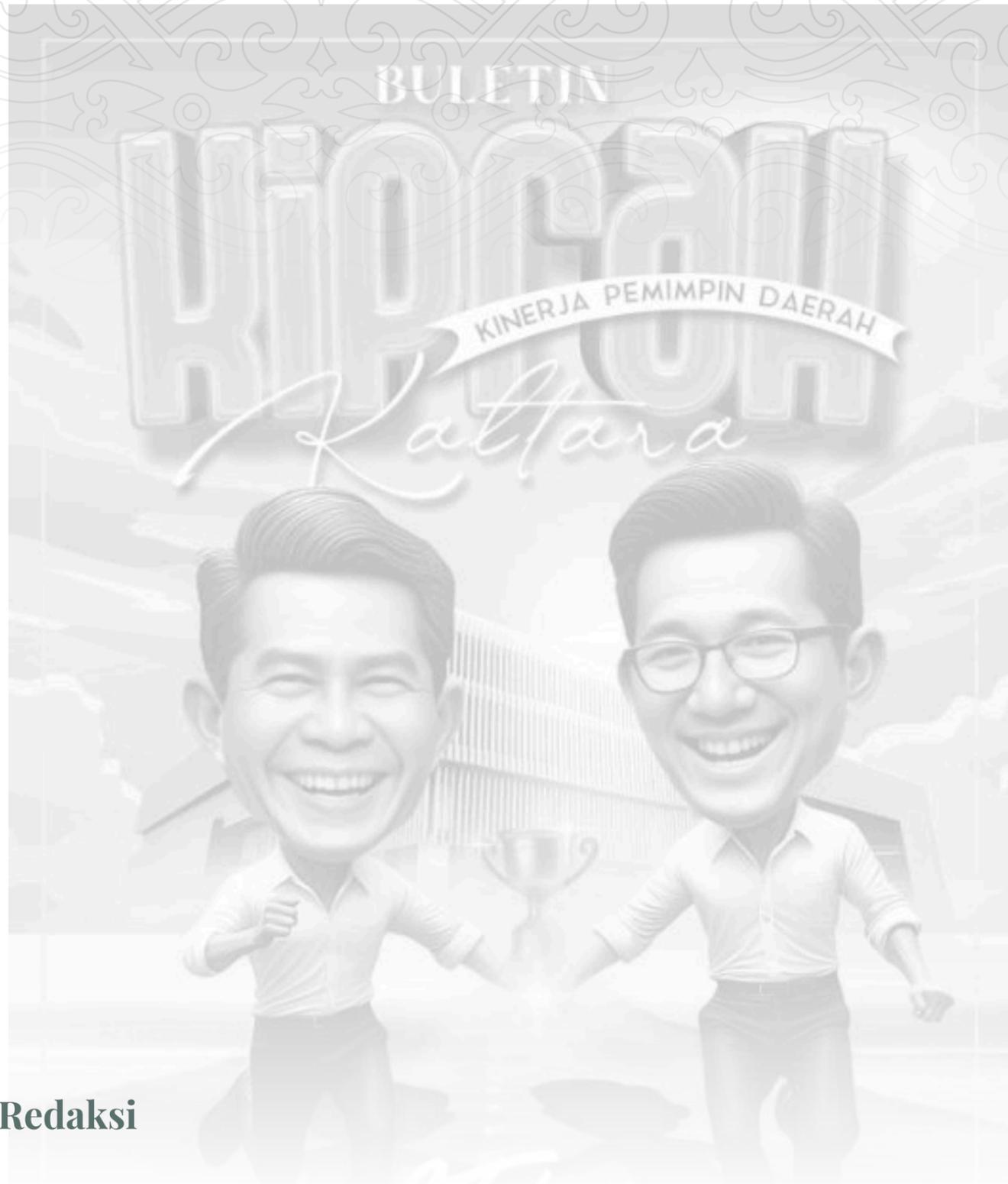
KIPRAH

KINERJA PEMIMPIN DAERAH

Kalbar



3 Tahun
Pencapaian dan Asa
Zainal - Yansen



Redaksi

Pembina: Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Utara | **Pengarah:** Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara | **Penanggungjawab:** Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara | **Redaktur:** Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Materi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara | **Editor :** Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Komunikasi dan Informasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara | **Penulis Artikel :** Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Dokumentasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara, Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Penetapan Materi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara | **Fotografer:** Staf Pelaksana Subbagian Dokumentasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara | **Perwajahan:** Staf Pelaksana Subbagian Komunikasi dan Informasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

IKHTISAR

Visi Berubah, Maju, Sejahtera merupakan pondasi dan hasil yang ingin dituju dalam roda pemerintahan pada kepemimpinan Zainal-Yansen. Dan komitmen untuk dapat mewujudkan visi misi Kalimantan Utara tersebut tergambar jelas dalam setiap kebijakan dan dukungan atas kegiatan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai daerah yang berkembang dari Daerah Otonomi Baru menjadi Daerah Otonom Penuh, Kalimantan Utara diyakini berdaya saing dengan segala potensi yang ada. Zainal-Yansen dalam tiga tahun perjalanan pemerintahannya menunjukkan pola kepemimpinan yang seimbang dalam meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan SDA. Sebut saja perhatian dan pengawalan langsung atas derajat kesehatan masyarakat baik dari segi pengentasan stunting, pemberian akses kesehatan melalui program dokter terbang, dedikasi untuk tenaga pendidik dan para pelajar melalui program Beasiswa Kaltara Unggul, pemantapan kesepakatan pembangunan fakultas kedokteran pertama demi memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, dan upaya lainnya.

Dari segi pembangunan infrastruktur dalam peningkatan mutu kinerja pegawai daerah, pembaharuan gedung-gedung kantor perangkat daerah telah berprogres aktif dan baik, membuka akses jalan dan mempermudah mobilitas dalam menggapai daerah-daerah di perbatasan juga menjadi poin yang terus digaungkan untuk menjadi program berkelanjutan, serta layanan pemenuhan kebutuhan Masyarakat, seperti SOA Penumpang dan SOA Barang juga Pembangunan Toko Indonesia masih dikawal secara serius perkembangannya. Juga bantuan sosial seperti pemenuhan kebutuhan listrik dan lain sebagainya masih menjadi kegiatan rutin yang harus ada dalam kebijakan pemerintah Zainal-Yansen.

Atas kinerja apik dan potensi yang ada di provinsi Kalimantan Utara tersebut menjadikan Kalimantan Utara sebagai salah satu dari center of attention Pemerintah Pusat. Tidak sedikit torehan prestasi dan ragam penghargaan yang telah diterima Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk pengakuan dan pembuktian komitmen dari kinerja Zainal-Yansen.

“Penghargaan ini kita jadikan motivasi, bukan hasil akhir dari setiap upaya kita,” tutur Gubernur Zainal.

Berangkat dari pengakuan atas berbagai hasil kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara beserta upaya untuk mewujudkan komitmen lainnya, Buletin KIPRAH KALTARA pada edisi kali ini mengangkat tema “Tiga Tahun Zainal-Yansen : Pencapaian dan Asa” yang diharapkan dapat menjadi sebuah “laporan” tidak langsung dari upaya perjalanan mencapai visi Kalimantan Utara Berubah, Maju, Sejahtera.*



Dirjen Otda: Kemajuan Kaltara yang Terbaik

* Di Antara Daerah Hasil Pemekaran



Sebagai daerah otonom yang masih muda, Provinsi Kalimantan Utara terus bergerak maju dalam koridor kebijakan pembangunan yang dirumuskan Pemerintah Provinsi, berkolaborasi dengan Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalamnya.

Memasuki usia 12 tahun, Provinsi Kalimantan Utara telah mencatatkan kemajuan pembangunan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan; percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; percepatan pembangunan perekonomian; percepatan pengelolaan potensi daerah; peningkatan keamanan dan ketertiban; dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Seperti diakui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si bahwa Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom yang beranjak dari status daerah otonomi baru (DOB), telah mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat di antara daerah-daerah pemekaran baru lainnya di Indonesia.

Penilaian Dirjen Otda tersebut tidak hanya ucapan semata, namun berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah dan kinerja pemerintah provinsi serta lima kabupaten/kota

yang menurutnya, sudah mencapai kategori tinggi.

Skoring status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri terhadap Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94.

"Sebetulnya ini sudah termasuk kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru," kata Akmal Malik di Tanjung Selor, 23 Januari 2024.

Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara sangat bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.

"Saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB dan ke depan kita akan membandingkan kinerja sesama daerah-daerah pemekaran, tidak lagi membandingkan dengan kinerja daerah induk atau provinsi lain yang sudah berusia ratusan tahun, itu tidak apple to apple (perbandingan dilakukan antara hal-hal yang setidaknya mempunyai kriteria perbandingan yang mirip)," tuturnya. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum menyambut kedatangan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI sekaligus Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Dr. Akmal Malik. M.Si di bandara Juwata Kota Tarakan, 23 Januari 2024. BIRO ADPIM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SKOR DAN STATUS KINERJA HASIL EVALUASI TAHUN 2023 OLEH KEMENDAGRI TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Kalimantan Utara **2,94**

Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
2,92	2,7	1,6	3,2	2,8

Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
 Angka Partisipasi warga negara usia 15-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah
 Tahun 2021 : 76,5
 Tahun 2022 : 76,5
 Tahun 2023 : 77,03

Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemprov Kalimantan Utara
 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi
 Tahun 2021 : 55,47
 Tahun 2022 : 56,34

Kinerja Urusan Trantibum Linmas Provinsi Kalimantan Utara

- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Tahun 2021 : 100
 Tahun 2022 : 100

- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Tahun 2021 : 25,00
 Tahun 2022 : 75,00

- Persentase penyiklaggaran dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Tahun 2021 : 0,00
 Tahun 2022 : 33,33

- Persentase penanganan pra bencana

Tahun 2021 : 60,00
 Tahun 2022 : 100,00

- Persentase penanganan tanggap darurat bencana

Tahun 2021 : 100,00
 Tahun 2022 : 100,00

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Tahun 2021 : 85,22
 Tahun 2022 : 80,67

- Ketepatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUI LH yang diterbitkan oleh Pemda

Tahun 2021 : 81,25
 Tahun 2022 : 100,00

Kinerja Kemandirian Fiskal

Tahun 2021 : 25,95
 Tahun 2022 : 29,86

Kemandirian fiskal menjadi satu tema penting bagi pemerintah daerah secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proporsi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah. Dalam dua tahun terakhir, PAD provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan hampir 4% dan realisasi PAD mencapai lebih dari 113% dari target PAD yang telah ditetapkan.

Sumber: Catatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah 2023 oleh Kemendagri.



Gubernur: Evaluasi Merefleksi Keberhasilan



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum bertukar cendera mata dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Dr. Akmal Malik, M.Si pada kegiatan kegiatan penyampaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tanjung Selor, Bulungan, 23 Januari 2024. BIRO ADPIM

Gubernur Kalimantan Utara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum memberi respons yang sangat positif terhadap evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

"Evaluasi itu sangat penting sebagai *feedback* atau umpan balik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah supaya semakin baik ke depan," kata Gubernur di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2023).

Gubernur menyebut evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai bahan pertimbangan penetapan target pembangunan serta pembinaan peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencakup kinerja urusan pemerintahan seperti pelayanan dasar, akuntabilitas, pelaksanaan tugas pembantuan, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

Gubernur mengakui, meskipun kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah relatif telah bagus, namun ada beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah proses penginputan indikator penilaian kinerja.

Menurut Gubernur, proses penginputan harus dipastikan seluruh prosesnya telah selesai dan masuk ke dalam SILPPD.

"Kenapa ini penting, karena ada beberapa daerah yang sejatinya sudah menginput, tetapi laporannya tidak terbaca sistem karena tidak submit di akhir proses penginputan, maka kroscek harus teliti," ujar dia.

Secara umum kata Gubernur, upaya untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah bagi Kalimantan Utara telah dan akan terus dilakukan. Otonomi daerah tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum menyerahkan bola voli kepada masyarakat tanda dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui olahraga. BIRO ADPIM

Kesejahteraan Masyarakat Meningkat: Analisa dan Indikator

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia (apakah tidak diganti dengan "provinsi ke-34 di Indonesia", karena saat ini ada yang lebih muda yang terbentuk pada 2012. Meskipun masih muda, provinsi ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatannya. Salah satu indikator yang dapat mengukur perkembangan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat terpenuhi. Ada berbagai cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan menggunakan *gini ratio* atau rasio gini.

Gini ratio adalah salah satu indikator yang mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai *gini ratio*, menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara masyarakat yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio*, menunjukkan pemerataan kesejahteraan yang semakin baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *gini ratio* Kalimantan Utara pada periode September 2023 mencapai 0,27, lebih baik dibanding periode September 2022 sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kalimantan Utara baik dan merata. Khususnya di era pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Secara spasial, Kalimantan Utara memiliki *gini ratio* terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Sedangkan pada tingkat nasional, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan *gini ratio* terendah kedua setelah Bangka Belitung.

Penurunan *gini ratio* di Kalimantan Utara tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan realisasi belanja APBD serta iklim investasi yang terus membaik dengan kehadiran proyek-proyek strategis nasional.

Selain itu, pemerintah provinsi juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Utara. Salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah suatu ukuran yang menggabungkan tiga aspek, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan.

Berdasarkan data BPS, IPM Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 72,88. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 71,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.

Selain IPM, kualitas SDM Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR). IKR adalah suatu publikasi tahunan yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat. Publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu kependudukan

yang meliputi enam bidang, yaitu kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, dan perumahan.

Berdasarkan publikasi IKR tahun 2023, beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Utara antara lain adalah:

1. Persentase penduduk miskin turun dari 6,86% pada September 2022 menjadi 6,45% pada Maret 2023.
2. Selama kurun waktu 2013-2023, Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan. Selama periode tersebut, UHH telah meningkat 0,67 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik, artinya rata-rata penduduk menjadi lebih sehat sehingga dapat hidup lebih lama. UHH Provinsi Kalimantan Utara tercatat mencapai 72,69 tahun pada 2023. Dengan demikian, penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang lahir pada tahun 2023 memiliki peluang hidup hingga sekitar usia 72 tahun 8 bulan. UHH Provinsi Kalimantan Utara terbilang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, bahkan telah melampaui UHH nasional yang hanya 72,13 tahun.
3. Angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun telah mencapai 98,98% pada 2022; 13-15 tahun mencapai 97,03 persen; dan 16-18 tahun mencapai 76,50%.
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 5,71% pada Februari 2020 menjadi 4,10% pada Agustus 2023.
5. Rata-rata pengeluaran per kapita, dari tahun 2021 Rp9,07 juta/orang/tahun naik menjadi Rp9,35 juta/orang/tahun pada 2022, dan naik lagi menjadi Rp9,73 juta/orang/tahun pada 2023.
6. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak meningkat dari 86,80% pada tahun 2021 menjadi 89,96% pada tahun 2022.

"Dari berbagai indikator tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang membanggakan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Utara," kata Gubernur Kalimantan Utara.

Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak boleh membuat berpuas diri. Masih banyak tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Utara.

"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Kalimantan Utara agar lebih maju dan sejahtera, dan tentunya berdaya saing," kata Gubernur. BIRO ADPIM



INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Indikator Pendidikan Kalimantan Utara

a. Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Utara

Tahun 2021 : 9,11 tahun
Tahun 2022 : 9,27 tahun
Tahun 2023 : 9,34 tahun

Dalam menghitung angka rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan bersekolah selama enam tahun, tamat SMP bersekolah selama sembilan tahun, dan tamat SMA bersekolah selama 12 tahun, semuanya tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

b. Harapan Lama Sekolah

Tahun 2021 : 12,94 tahun
Tahun 2022 : 13,06 tahun
Tahun 2023 : 13,20 tahun

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah dan berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

c. Angka Melek Huruf

Tahun 2021 : 96,60%
Tahun 2022 : 97,70%
Tahun 2023 : 97,78%

d. Peserta Didik Semester Genap 2023/2024

Taman Kanak-Kanak (TK) 4-6 tahun	: 6.614 orang
Kelompok Bermain 2-4 tahun	: 6.167 orang
Taman Penitipan Anak	: 486 orang
Satuan PAUD Sejenis (SPS)	: 67 orang
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	: 5.965 orang
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	: 813 orang
Sekolah Dasar (SD)	: 41.216 orang
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 16.334 orang
Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 9.242 orang
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	: 10.321 orang
Sekolah Luar Biasa (SLB)	: 580 orang
Total Peserta Didik	: 160.803 orang



Taman Kanak-Kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah.

KB (Kelompok Bermain) adalah Bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun, jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK.

TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak.

KBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran non-formal masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program PNF/PAUD Dikmas.

Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan dan menyelenggarakan program PNF/PAUD Dikmas.

Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Sumber: Berbagai sumber (BPS, Keputusan Menteri, RKPD Kalimantan Utara 2024)
diolah **Biro Adpim**

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2. Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Tahun 2020
72,59 Tahun

Tahun 2021
72,65 Tahun

Tahun 2022
72,67 Tahun

Tahun 2023
73,54 Tahun

Prevalensi Stunting

Tahun 2015 : 31,1%
Tahun 2016 : 31,6%
Tahun 2017 : 33,3%
Tahun 2018 : 26,9%
Tahun 2019 : 26,25%
Tahun 2020 : 18,15%
Tahun 2021 : 27,5%
Tahun 2022 : 21,1%
Tahun 2023 : belum diumumkan

3. Pekerjaan Umum, Transportasi, dan Komunikasi

a. Panjang Jalan Kewenangan Provinsi 2023 : 851,88 kilometer.
Dirinci menurut kabupaten/kota, panjang jalan kewenangan provinsi terpanjang berada di:

Kabupaten Bulungan 410,05 kilometer
Kabupaten Nunukan 215,45 kilometer
Kabupaten Malinau 111,82 kilometer

Kondisi 851,88 kilometer tersebut:

Aspal : 13,73% (133,57 kilometer)
Beton : 1,35% (11,51 kilometer)
Kerikil : 9,88% (77,39 kilometer)
Tanah : 75,04% (629,41 kilometer)

b. Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kalimantan Utara Jalan Nasional

Tahun 2021 : 590,85 kilometer
Tahun 2022 : 590,85 kilometer
Tahun 2023 : 645,75 kilometer

Jalan Provinsi

Tahun 2021 : 851,88 kilometer
Tahun 2022 : 851,88 kilometer
Tahun 2023 : 851,88 kilometer

Jalan Kabupaten/Kota

Tahun 2021 : 2.979,72 kilometer
Tahun 2022 : 3.107,17 kilometer
Tahun 2023 : 3.131,05 kilometer



c. Jumlah Kendaraan Bermotor 2023

Sepeda Motor : 377.897 unit
Mobil Penumpang : 25.056 unit
Bus : 318 unit
Truk : 19.003 unit

d. Banyaknya Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler

Tahun 2020
4G/LTE : 169 desa
3G/H/H+/EVDO : 45 desa
2,5G/E/GPRS : 77 desa
Tidak Ada Sinyal Internet: 164 desa

Tahun 2021
4G/LTE : 227 desa
3G/H/H+/EVDO : 35 desa
2,5G/E/GPRS : 76 desa
Tidak Ada Sinyal Internet: 144 desa

Sumber: Berbagai sumber (BPS, Keputusan Menteri, RKPD Kalimantan Utara 2024)
diolah **Biro Adpim**



#kaltaradhati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



berAKHLAK
bangga melayani bangsa



#kaltaradhati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



berAKHLAK
bangga melayani bangsa

INDIKATOR SEKTOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. Perbankan dan Koperasi Tahun 2023

- Perbankan**
- Bank Swasta Nasional : 12 unit bank
 - Bank Swasta Syariah : 4 unit bank
 - Bank Persero : 45 unit bank
 - Bank Pembangunan Daerah : 66 unit bank
- Koperasi**
- Koperasi : 978 unit
 - Koperasi Unit Desa : 9 unit
 - Jumlah anggota : 23.875 orang

2. Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2023

- Bukan Makanan : 51,70% (Rp811.755)
 - Makanan : 48,30% (Rp758.431)
- Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Rp1.570.186
- Perumahan dan fasilitas rumah tangga : 30,05% (Rp471.900)
 - Makanan dan Minuman Jadi : 12,68% (199.140)

3. Perdagangan Luar Negeri

Volume dan Nilai Ekspor Impor Kalimantan Utara 2023

a. Ekspor

- Volume 34,64 juta ton
Nilai 2.861,77 juta Dolar AS
Mengalami kenaikan volume 7,07% dibanding tahun 2022
Komoditas : Bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingan, zat mengandung bitumen, ikan dan moluska, tembakau dipabrisasi, kayu, biji-bijian, olahan daging, sereal, getah damar, ekstrak nabati, tanaman industri.

b. Impor

- Volume 618,21 ribu ton
Nilai 688,56 juta Dolar AS
Mengalami kenaikan volume 347,06% dibandingkan tahun 2022
Impor berasal dari Kamboja, Singapura, India, Cina, Filipina, Italia, Malaysia, Jepang, Taiwan, Bangladesh, Korea, Thailand.

c. Volume ekspor Menurut Pelabuhan 2023

- Tanjung Selor : 17,68% (Volume 4,2 juta ton)
- Lingkas Tarakan : 52,43% (22,7 juta ton)
- Nunukan : 10,21% (2,3 juta ton)
- Bunyu : 19,69% (16,6 ribu ton)

4. Industri Manufaktur

- Industri Besar dan Sedang**
- Jumlah : 32 perusahaan
 - Tenaga Kerja : 16.351 pekerja

Industri Mikro dan Kecil

- Jumlah Perusahaan : 5.356
- Tenaga Kerja : 10.194 pekerja
- Nilai Produksi : Rp918.031.001

Sumber : Berbagai sumber (BPS, Keputusan Menteri, RKPD Kalimantan Utara 2024) diolah **Biro Adpim**

5. Pertanian

a. Luas Panen Padi

- Tahun 2022 : 8.604,19 ha
- Tahun 2023 : 6.632,07 ha

b. Produktivitas

- Tahun 2021 : 35,49 kuintal gkg (gabah kering giling)
- Tahun 2022 : 36,71 kuintal gkg

c. Produksi Padi

- Tahun 2022 : 30.533,59 ton
- Tahun 2023 : 24.347,22 ton

d. Produksi Beras

- Tahun 2022 : 18.101,49 ton
- Tahun 2023 : 14.433,96 ton

e. Luas Panen dan Produksi Hortikultura Tahun 2023

- Bawang Daun : 261 ha (20.107 kuintal)
- Bayam : 486 ha (20.573 kuintal)
- Buncis : 195 ha (30.384 kuintal)
- Cabai Rawit : 444 ha (63.702 kuintal)
- Kubis Panjang : 286 ha (31.046 kuintal)
- Kangkung : 509 ha (39.368 kuintal)
- Timun : 235 ha (52.309 kuintal)
- Labusiam : 37 ha (13.676 kuintal)
- Melon : 77 ha (3.987 kuintal)
- Sawi : 463 ha (30.504 kuintal)
- Semangka : 179 ha (24.107 kuintal)
- Terung : 239 ha (94.389 kuintal)
- Tomat : 272 ha (100.100 kuintal)
- Cabai Besar : 236 ha (53.281 kuintal)
- Cabai Keriting : 82 ha (12.992 kuintal)
- Jamur Tiram : 2.058 ha (1.382 kuintal)

f. Produksi Buah-buahan 2023

- Alpukat : 226 kuintal
- Anggur : 1 kuintal
- Belimbing : 1.753 kuintal
- Duku/Langsat : 16.155 kuintal
- Durian : 41.241 kuintal
- Jambu Air : 5.724 kuintal
- Jambu Biji : 2.911 kuintal
- Jengkol : 286 kuintal
- Jeruk Besar : 32 kuintal
- Jeruk Siam/Koprik : 30.953 kuintal
- Mangga : 71.804 kuintal
- Manggis : 384 kuintal
- Melinjo : 1.074 kuintal
- Nangka/Cempedak : 202.032 kuintal
- Nenas : 7.785 kuintal
- Pepaya : 240.156 kuintal
- Petal : 3.221 kuintal
- Pisang : 772.734 kuintal
- Rambutan : 20.522 kuintal
- Salak : 42.167 kuintal
- Sawo : 576 kuintal
- Sirsak : 1.890 kuintal
- Sukun : 4.656 kuintal
- Buah Naga : 479 kuintal
- Lemon : 410 kuintal
- Lengkuang : 227 kuintal

INDIKATOR SEKTOR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

6. Perkebunan

Luas Area dan Produksi Perkebunan 2023

- Kelapa sawit : 39.466,50 ha (75.738,90 ton)
- Kelapa : 1.283,45 ha (592,40 ton)
- Karet : 640,20 ha (295,40 ton)
- Kopi : 1.000,90 ha (218,48 ton)
- Kakao : 2.464 ha (821,11 ton)
- Tebu : 60 ha (8,25 ton)

7. Kehutanan

a. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan 2023

- Hutan Lindung : 1.059.616,20 ha
- Konservasi : 1.272.081,90 ha
- Hutan Produksi Terbatas : 2.189.473,46 ha
- Hutan Produksi Tetap : 1.073.281,01 ha
- Hutan Produksi Dapat Dikonversi : 60.020,12 ha
- Areal Penggunaan Lain (APL) : 890.676,27 ha
- Jumlah Luas Hutan dan Perairan : 5.654.472,69 ha

b. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi 2022 Kayu Bulat

- IUPHHK-HA 587.245 m3
- IUPHHK-HT 656.715 m3
- Perum Perhutani -

Kayu Olahan

- Kayu Gergajian 8.676,15 m3
- Kayu Lapis/Plywood 99.228 m3
- Veneer 3.663 m3

c. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Tahun 2021 3.558,86 ha
- Tahun 2022 5.476,62 ha
- Tahun 2023 767,24 ha

8. Peternakan

a. Populasi Ternak Tahun 2022

- Sapi Potong : 21.553 ekor
- Kerbau : 4.032 ekor
- Kuda : 6 ekor
- Kambing : 9.561 ekor
- Domba : 23 ekor
- Babi : 16.639 ekor

c. Produksi Daging Ternak Tahun 2023

- Sapi Potong : 891.620,94 kg
- Kerbau : 17.038,73 kg
- Kambing : 144.716 kg
- Babi : 505.586,41 kg
- Ayam Kampung : 1.289.992,55 kg
- Ayam Petelur : 73.185,53 kg
- Ayam Pedaging : 9.238.603,49 kg
- Itik : 22.613,37 kg

d. Produksi Telur Unggas Tahun 2023

- Ayam Kampung : 4.837.748,93 kg
- Ayam Petelur : 1.293.238,35 kg
- Itik : 240.553,51 kg

b. Populasi Unggas

- Ayam Kampung**
- Tahun 2021 : 1.166.271 ekor
 - Tahun 2022 : 1.117.544 ekor
- Ayam Petelur**
- Tahun 2021 : 165.740 ekor
 - Tahun 2022 : 171.060 ekor
- Ayam Pedaging (Broiler)**
- Tahun 2021 : 3.924.603 ekor
 - Tahun 2022 : 4.356.184 ekor
- Itik**
- Tahun 2021 : 35.318 ekor
 - Tahun 2022 : 28.903 ekor

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2023:

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan : Rp20,9 miliar

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : Rp7,1 miliar
- Kehutanan dan Penebangan : Rp4,6 miliar
- Perikanan : Rp9,2 miliar

b. Pertambangan dan Penggalian: Rp50,3 miliar

- Migas dan Panas Bumi : Rp3,8 miliar
- Batu Bara : Rp38,9 miliar
- Bijih Logam : Rp2,2 miliar
- Penggalian Lainnya : Rp5,2 miliar

c. Industri Pengolahan

- Makanan dan Minuman : Rp6,4 miliar
- Tekstil dan Pakaian Jadi : Rp71,3 juta
- Industri Kulit, Barang dari Kulir, Alas Kaki : Rp5,6 juta
- Kayu, Gabus, dan Anyaman Bambu/Rotan : Rp2,8 miliar
- Kertas, Percetakan : Rp1,3 miliar

Sumber : Berbagai sumber (BPS, Keputusan Menteri, RKPD Kalimantan Utara 2024) diolah **Biro Adpim**



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si berpidato pada salah satu kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan di Tanjung Selor, Bulungan. BIRO ADPIM

Pelayanan Publik Semakin Baik

* Terapkan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Pelayanan publik adalah salah satu tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dilakukan dengan profesional, ramah, responsif, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat, serta membangun citra positif pemerintah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah melalui berbagai cara seperti membangun budaya pelayanan pelayanan prima, menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

ASN lingkungan Pemprov Kalimantan Utara juga menerapkan *core value* atau nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK, yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. *Core Value* BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Untuk melihat cerminan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan Pemprov Kalimantan Utara juga mengikuti penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditugaskan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan 12 indikator, yaitu:

- Ketersediaan standar pelayanan
- Ketersediaan sarana dan prasarana
- Ketersediaan sistem informasi pelayanan
- Ketersediaan mekanisme pengaduan
- Ketersediaan mekanisme konsultasi
- Ketersediaan mekanisme partisipasi
- Ketersediaan mekanisme koordinasi
- Ketersediaan mekanisme supervisi
- Ketersediaan mekanisme evaluasi
- Ketersediaan mekanisme penghargaan dan sanksi
- Ketersediaan mekanisme peningkatan kompetensi
- Ketersediaan mekanisme peningkatan kinerja

Berdasarkan penilaian kepatuhan tahun 2023, Pemprov Kaltara berhasil meraih nilai tertinggi dan masuk dalam kategori A dengan skor 89,23 kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 78,672.

Pencapaian ini tidak lepas dari peran 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi indikator penilaian, yaitu:

- Dinas Sosial dengan nilai 89,23
- Dinas Kesehatan dengan nilai 90,10
- Rumah Sakit Jusuf SK dengan nilai 88,99
- Dinas Pendidikan dengan nilai 88,53
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dengan nilai 89,31

Keberhasilan kelima OPD ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalimantan Utara telah menerapkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemprov Kalimantan Utara juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain:

Melakukan bimbingan teknis (bimtek) service excellent bagi ASN se-Kalimantan Utara tahun 2024. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN dalam memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan mudah.

Membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang standar pelayanan, prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu pelayanan, dan hasil pelayanan.

Membuka saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui website, media sosial, call center, dan aplikasi *mobile*. Saluran ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, keluhan, atau pengaduan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Kalimantan Utara.

Melakukan koordinasi, supervisi, evaluasi, penghargaan, dan sanksi terhadap kinerja pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk memberikan motivasi dan koreksi bagi ASN yang bertugas.

Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Pemprov juga mengharapkan partisipasi dan konsultasi dari masyarakat untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan dapat semakin memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



Pencapaian dan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapat **89,23 poin** sehingga menyandang status Predikat A



Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara PROLANTERAKU

menerima penghargaan kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

PROLANTERAKU adalah inovasi pelayanan publik bidang kesehatan yang menjangkau masyarakat daerah terpencil, perbatasan/pedalaman, dan kepulauan (DTPK).

Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan SIPELANDUKILAT

masuk dalam 11 Program Inovasi yang akan diikutsertakan pada United Nation Public Service Awards (UNPSA) 2024 mewakili Indonesia. SIPELANDUKILAT merupakan inovasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, dengan menjangkau masyarakat daerah terpencil, perbatasan/pedalaman, dan kepulauan (DTPK).





Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum - Dr. Yansen TP, M.Si turut dalam kegiatan peluncuran pengapalan perdana ekspor Liquid Natural Gas (LNG) PT Kayan LNG Nusantara dan JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris di Pelabuhan Malundung, Tarakan. BIRO ADPIM

Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kalimantan Utara) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat daya saingnya. Berbagai langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial di wilayah ini.

Penguatan daya saing yang dimaksud adalah daya saing sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Pemprov Kalimantan Utara telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing SDA dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi secara komprehensif dan berkala untuk mengetahui potensi dan cadangan SDA yang dimiliki daerah.

Gubernur Kalimantan Utara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. mengatakan, pengembangan potensi SDA juga mencakup upaya pengelolannya secara berkelanjutan untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatan SDA yang optimal.

Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan SDA yang tepat guna dan ramah lingkungan menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah SDA. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan dalam bidang pengelolaan SDA melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan.

Mengembangkan industri yang berbasis pada SDA yang dimiliki daerah juga diyakini akan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja seperti eksplorasi dan eksploitasi potensi energi baru terbarukan untuk menghasilkan energi listrik dari Sungai Kayan dan Sungai Mentarang melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang terkoneksi dengan Proyek Strategis Pemerintah Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di

Kabupaten Bulungan.

Dalam hal peningkatan daya saing sumber daya manusia, Pemprov Kalimantan Utara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan semua jenjang, khususnya pendidikan menengah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, mengembangkan keterampilan vokasi melalui dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian SDM yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri.

Peningkatan akses kesehatan tidak kalah penting untuk membangun daya saing SDM. Selain itu, pengembangan budaya inovasi dan kreativitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah.

Lingkungan

Pada aspek lingkungan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks daya saing tertinggi bidang pelestarian. Hal ini tercatat dalam Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) yang dirilis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Terra Komunika, dan Kinara Indonesia pada 2022.

Terdapat empat pilar besar yang menjadi tolok ukur dalam IDSDB, yakni pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan.

- Khusus untuk pilar lingkungan lestari, IDSDB diukur menggunakan variabel-variabel:
- Kualitas Lingkungan Hidup: Persentase desa yang mengalami longsor dan banjir, serta jumlah kejadian kebakaran.
 - Pengelolaan SDA dan Lingkungan:

- Persentase desa yang melakukan normalisasi sungai, kanal, waduk, serta persentase desa yang memiliki bank sampah dan sanitasi layak.
- Resiliensi Lingkungan: Rasio anggaran mitigasi bencana terhadap total belanja APBD.

Hasil pengukuran kemudian dirumuskan ke dalam skor berskala 0-100, dengan kategorisasi berikut:

- Skor 0 sampai 30: Daya saing rendah
- Skor 30,01 sampai 60: Daya saing sedang
- Skor 60,01 sampai 80: Daya saing tinggi
- Skor 80,01 sampai 100: Daya saing sangat tinggi

Pada 2022 Kalimantan Utara meraih skor 62,89 dalam pilar lingkungan lestari. Skor ini masuk ke golongan daya saing tinggi, sekaligus menjadi skor terbaik di antara 29 provinsi yang diriset. Kepulauan Riau menempati peringkat kedua dengan skor IDSDB pilar lingkungan lestari 61,26. Selanjutnya ada Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah dengan skor masing-masing 60,99 dan 59,97.

Industri Unggulan

Provinsi Kalimantan Utara tengah menjadi sorotan nasional dan dunia karena hadirnya kawasan industri hijau terbesar dunia yang disebut Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning - Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.

Sampai akhir 2023 sudah terdapat 10 perusahaan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pengelola KIHI. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, antara lain industri smelter, baja, aluminium, energi terbarukan, dan logistik. Pembangunan KIHI telah dimulai sejak 2021.

Pembangunannya terus berjalan sejak Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama proyek tersebut pada 21 Desember 2021. KIHI Tanah Kuning merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi 132 miliar dolar AS dan target luas pengembangan mencapai 30.000 hektare.

Kawasan ini akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia, yang mengutamakan proses industri berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kawasan ini juga menampung berbagai jenis industri, antara lain pemurnian dan pengolahan mineral, pergudangan, properti, perdagangan, dan komersial.

Salah satu industri unggulan yang akan dibangun di kawasan ini adalah pabrik petrokimia, yang diproyeksi menjadi pabrik petrokimia terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 4x16 juta ton per tahun.

Pada kawasan ini juga dikembangkan industri energi hijau, seperti panel surya (*solar panel*), smelter aluminium (*green aluminium smelter*), baterai energi baru (*new energy battery*), dan industri silikon dan polikristalin (*industrial and polycrystalline silicon*).



Hamparan permukiman, sungai, dan hutan di Kabupaten Bulungan. BIRO ADPIM

Pembangunan infrastruktur dasar KIHI telah dimulai, antara lain jalan akses, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

Pembangunan pelabuhan internasional yang tidak terpisahkan dari pengembangan kawasan industri ini juga telah dimulai. Tahap pertama pelabuhan ini ditargetkan selesai pada 2025. KIHI ini ditargetkan dapat menyerap 200.000 tenaga kerja dan memberikan kontribusi ekonomi sebesar Rp1.000 triliun per tahun.

Pertambangan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang signifikan. Potensi kandungan sumberdaya geologi di Provinsi Kalimantan Utara yang utama adalah batubara, minyak dan gas bumi, emas, tembaga, timbal dan besi dan potensi tambahan seperti tambang mineral/batuan antara lain batuan, beku andesit, diorit, granit, trakit, batu gamping, pasir kuarsa, lempung/batulempung.

Sekitar 70 horizon atau lapisan batubara dengan nilai panas 6.000- 7.000 kalori/gram ada di Kabupaten Bulungan dan sebagian kecil di daerah Malinau dan Tarakan. Sedangkan minyak dan gas bumi banyak ditemukan di lepas pantai (*offshore*) sekitar Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu.

Kegiatan eksplorasi pada tambang emas diharapkan dapat dikembangkan di daerah Busang, Long Lai, di lembar peta Napaku, serta di daerah Bengara dan Sekatak Buji di lembar peta Tarakan sebagai endapan placer (endapan sungai) yang sumber emasnya berasal dari mineral hidrotermal oleh adanya intrusi diorit di daerah tersebut.

Potensi tambahan seperti batuan beku andesit, diorit, granit, trakit banyak ditemukan di lembar peta Napaku, Malinau, Lumbis. Pasir kuarsa dan batu lempung banyak tersebar di Tarakan dan Malinau.

Sungai untuk Energi

Kalimantan Utara juga dianugerahi dengan sungai-sungai seperti Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Pimping, Sungai Bandan, Sungai Sekatak, Sungai Jelarai, Sungai Mentarang, Sungai Linuang Kayan, Sungai Betayau, Sungai Sembakung, Sungai Mandul, Sungai Semandak, Sungai Mintut, Sungai Manguli. Sungai tersebut merupakan media transportasi air bagi masyarakat. Selain itu, sungai tersebut juga sebagai sumber mata pencaharian nelayan tradisional di wilayah ini. Beberapa sungai-sungai tersebut memiliki potensi energi listrik terbarukan yang saat ini tengah digarap seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan 9.000 Mega Watt dan PLTA Sungai Mentarang 1.350 MW.

Sekitar 90,06 persen dari luasan total wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 6.440.254 hektare didominasi oleh hutan. Luasan pertanian tersebar sekitar 1,55 persen atau 110.751 hektare dari total luas wilayah. Penggunaan lahan hutan negara mendominasi di seluruh kabupaten, namun terbanyak terdapat di Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peta Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037, wilayah pemanfaatan lahan yang paling luas adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 2.164.338,10 hektare (27,86%) dan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya dengan luas 1.276.329,86 hektare (16,43%).

Hutan

Kalimantan utara memiliki Kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 ha atau 74,59 persen dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara ± 75.467,70 km². Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi

yang sangat besar bagi pemerintah Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hutan di Provinsi Kalimantan Utara berupa pemanfaatan hasil kayu dan non kayu. Hasil non kayu berupa tanaman obat, madu, ekstrak tanaman dan lain-lain. Hasil non kayu terus dikembangkan guna mengurangi pemanfaatan hasil kayu.

Hal ini disebabkan oleh besarnya potensi hutan Kalimantan Utara yang sangat luas untuk menghasilkan karbon sebagai penyerap CO₂ dan dapat menstabilkan iklim dunia. Hal tersebut akan untuk mendapatkan funding dana.

Perikanan

Sebagian besar wilayah Kalimantan Utara merupakan laut. Hal ini menyebabkan melimpahnya hasil laut di wilayah Kalimantan Utara. Hasil produksi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara didominasi dengan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan budidaya, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar di sektor kelautan dan perikanan. Penghasilan yang didapatkan di sektor perikanan cukup besar, karena hasil produksi perikanan seperti kepiting, udang dan ikan di ekspor keluar negeri.

Pada 2021, produksi perikanan budidaya Kalimantan Utara mencapai 563.140,49 ton, naik dibanding 2020 sebanyak 536.897 ton. Berdasarkan komoditasnya, perikanan budidaya ini terbagi atas komoditas udang 9.240 ton, ikan 4.894 ton, dan rumput laut 627.875 ton.

Adapun produksi perikanan tangkap laut mencapai sebanyak 33.151,95 ton pada 2021, naik dari 25.230,04 ton pada 2020. Adapun produksi perikanan tangkap umum daratan mencapai 546,5 ton pada 2021.



Tampak dari udara, area berprogres milik salah satu perusahaan pengembang Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. BIRO ADPIM

Pesisir

Provinsi Kalimantan Utara garis pantai dan wilayah laut 12 mil di Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang garis pantai 3.519,19 Km dan batas wilayah laut 12 mil dengan luas 7.316,43 Km² atau setara dengan 731.642,77 hektare. Area tambak dengan luas 129.080,1 hektare (data 2021) yang dibagi dalam 3 area tambak dalam status kawasan hutan terdiri dari tambak dalam APL (Area Penggunaan Lain) dengan luas 78.591,74 Ha, tambak dalam HP (Hutan Produksi) dengan luas 70.706,76 Ha, dan tambak dalam HPK (Hutan Produksi Konversi) dengan luas 659,39 Ha.

Pertanian

Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Luas wilayah yang sampai saat ini digunakan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas mencapai 110.751 hektare. Atas dasar itu kegiatan pertanian di provinsi ini didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial secara seimbang.

Meski demikian, Pemprov Kalimantan Utara berusaha keras untuk mendorong peningkatan produksi pertanian padi yang saat ini mengalami penurunan yakni dari 29.967,31 ton (2021), menjadi 30.533,59 ton (2022), kemudian turun menjadi 24.347,22 ton (2023).

Penurunan itu disebabkan beberapa faktor antara lain petani beralih profesi. Pemprov Kalimantan

Utara dorong keterlibatan anak-anak muda untuk menggarap sektor pertanian di daerah ini.

Perkebunan

Komoditas perkebunan meliputi kelapa, kelapa sawit, karet, kakao, kopi. Komoditas perkebunan tersebut ada yang diusahakan dalam bentuk perkebunan swasta besar khususnya kelapa sawit dan lainnya sebagai kebun rakyat.

Provinsi Kalimantan Utara, dengan sektor perkebunan yang signifikan, turut berkontribusi terhadap PDRB provinsi. Dengan luasan lebih dari 579.420 hektar perkebunan kelapa sawit dan 20 pabrik pengolahan yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung. Hal ini menunjukkan prospek cerah bagi Kalimantan Utara dalam pengembangan sektor perkebunan.

Realisasi pembangunan kebun plasma dan jumlah tenaga kerja yang mencapai 8.333 orang menjadi indikator positif.

Pada tahun 2021, perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara menghasilkan lebih dari 12.664,42 ton kelapa sawit. "Dampak ekonomi dari perkebunan kelapa sawit juga terlihat dalam kontribusinya terhadap APBD. Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mendapatkan dana bagi hasil kelapa sawit sebesar Rp56.351.938.000.

Hortikultura

Hutan tropis yang sangat luas di Provinsi Kalimantan beserta keanekaragaman hayati yang ada didalamnya merupakan sumber daya alam Indonesia yang tak ternilai harganya. Saat ini sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat obat, namun baru sekitar 200 spesies yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri obat tradisional dan dari jumlah tersebut baru sekitar 4% yang dibudidayakan.



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menyalami pemimpin upacara Apel Bulan K3 di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Februari 2024. BIRO ADPIM

Dengan potensi-potensi ini, Kalimantan Utara memiliki peluang besar untuk menarik investor. Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat daya saing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berbuah hasil yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. BIRO ADPIM



#kaltaradihati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI DALAM MEMBANGUN DAYA SAING PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatkan pengelolaan hutan, tambang, dan perikanan secara berkelanjutan. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan kerja. Fokus pada pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Mendorong inovasi dan kreativitas melalui pendidikan dan pelatihan.



Diversifikasi Ekonomi

Mengembangkan sektor ekonomi selain SDA, seperti pariwisata, industri, dan pertanian. Mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi.



Infrastruktur dan Aksesibilitas

Meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah. Memperbaiki aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil.



Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Pendidikan

Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan SDA dan SDM. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi.



Dengan mengimplementasikan strategi di atas, Kaltara dapat meningkatkan daya saingnya dalam mengelola SDA dan mengembangkan SDM yang berkualitas. BIRO ADPIM



Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menuangkan batu dan tanah asal Kalimantan Utara ke dalam kendi di kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Maret 2022. BIRO ADPIM

Jaga Kolaborasi dengan Induk

***Selain Pangan, Kaltim Tertarik Kerja Sama Pemenuhan Energi bagi IKN**

Gubernur Kalimantan Utara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur yang juga menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri menjajaki peluang kerja sama terkait pemenuhan energi listrik bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pasti (ada peluang), kita tahu bahwa penyuplai energi untuk IKN itu yang terbesar adalah dari Kalimantan Utara karena di sini (Kalimantan Utara) sedang dibangun PLTA terbesar di Indonesia," kata Akmal Malik di Tanjung Selor, 23 Januari 2024.

Di Kalimantan Utara sedang dibangun dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu PLTA Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan berkapasitas 9.000 Mega Watt (MW) dan PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau berkapasitas 1.375 MW.

Pembangunan PLTA Mentarang Induk ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret 2023. Adapun PLTA Sungai Kayan sudah dimulai pembangunan bendungan tahap satu dari lima bendungan yang direncanakan.

Saat di Malinau, Presiden Jokowi menyatakan PLTA Mentarang Induk juga bakal menyuplai pasokan listrik ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Suplai listrik itu akan terkoneksi dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Akmal Malik mengatakan, kolaborasi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara sangat dibutuhkan ke depan dalam rangka mendukung pembangunan dan perkembangan IKN ke depan. Dan menurutnya, dua provinsi ini telah membangun sinergi yang kuat sebagai daerah induk dan daerah pemekaran.

Dia mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara tidak akan dibatasi oleh persoalan administratif. Sebaliknya, dari sisi fungsional, kedua provinsi ini sudah sejak lama memiliki fungsi yang baik.

"Tinggal komunikasi apa lagi yang Kalimantan Utara bisa lakukan, mungkin menyuplai pangan ke IKN," ujar Akmal Malik.

Dia mengatakan, kebutuhan pangan Kalimantan Timur sejauh ini dominan disuplai dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Untuk itu, dia menyebut kehadiran Kalimantan Utara juga sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan pangan IKN ke depan.

"Dan kami optimis Kalimantan Utara bisa karena potensi pangan yang dimilikinya sangat besar seperti potensi perikanan, pertanian, dan perkebunannya," ujar dia.

Untuk menindaklanjuti potensi itu kata Akmal, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara segera melakukan komunikasi secara *government to government* atau antar dua

pemerintah daerah maupun secara business to business atau antara BUMD/swasta dua daerah.

Gubernur Kalimantan Utara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. menyatakan, Kalimantan Utara siap mengambil peran vital sebagai penyangga IKN. Tidak saja dalam hal energi, namun juga sektor pangan.

Berdasarkan catatan Biro Adpim, Kementerian Pertanian RI telah menunjuk 12 daerah potensial penyangga pangan, tiga diantaranya berada di Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan akan menjadi sentra tanam padi dan cabai. Sedang Kabupaten Malinau menjadi sentra padi dan jagung.

Provinsi Kalimantan Utara telah mendapat dukungan dana Kementerian Pertanian RI melalui anggaran tugas pembantuan tahun 2020 yang diberikan kepada Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani untuk pengembangan komoditas bawang merah seluas 40 hektare, aneka cabai seluas 160 hektare, padi sawah seluas 5.000 hektare, dan padi rawa seluas 5.000 hektare di tiga daerah bersangkutan.

Ketersediaan lahan pengembangan pangan di Kalimantan Utara mencapai 658.355 hektare



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur-Kalimantan Utara di Balikpapan, Agustus 2023. BIRO ADPIM

yang tersebar di tiga daerah tersebut. Rincinya, 325.123 hektare di Nunukan, 164.512 di Bulungan, dan 168.720 di Malinau.

Menyiapkan diri sebagai penyangga pangan, Pemprov Kalimantan Utara juga mencanangkan beberapa program yang bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi pengamanan ketersediaan pangan antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.

Pemprov Kalimantan Utara pun berupaya meningkatkan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil juga punya peranan sangat penting.

Caranya, mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil.

"Kita juga gencar menerapkan diversifikasi

pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal," ujar Gubernur.

Berdasarkan indikator luas panen, produktivitas, dan produksi padi Kalimantan Utara yang dirilis BPS menunjukkan bahwa produktivitas meningkat pada tiga tahun terakhir yaitu 33,74 kuintal per/hektare Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021, menjadi 35,49 kuintal per hektare pada 2022, hingga menjadi 36,71 kuintal per hektare pada 2023.

Meski demikian luas panen dan produksi padi berdasarkan catatan BPS, cenderung turun dalam tiga tahun terakhir akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan serta alih profesi petani menjadi pekebun dan pembudidaya rumput laut.

Pada 2021 luas panen padi di Kalimantan Utara mencapai 8.880 hektare dan tersisa 6.632 hektare pada 2023. Adapun produksinya mencapai 29.967,31 ton pada 2021 turun menjadi 24.347,22 ton pada 2023.

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya menjaga luas kawasan pertanian melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu Pemprov Kalimantan Utara melalui dinas terkait mengencakan penyuluhan dan pelatihan kepada petani terkait teknologi pertanian modern. Penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, dan pengelolaan irigasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, melakukan diversifikasi produk. Selain padi, Kalimantan Utara mengembangkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, dan sayuran. Diversifikasi produk akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman.

Kerja sama dengan lembaga seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Batlitbangtan) serta perguruan tinggi terkait menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian dan pengembangan varietas padi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kaltara dapat meningkatkan produksi padi dan mengatasi tren penurunan yang terjadi. **BIRO ADPIM**



Pegawai Disperindagkop Kalimantan Utara bersiap-siap melakukan operasi pasar murah di Tanjung Selor. Disperindagkop menyiapkan armada ADINDAKU (Angkutan Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Utara) untuk mempermudah operasi pasar. BIRO ADPIM

Kendalikan Inflasi Tahunan jadi 2,44 Persen

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, yang indikator ini merupakan indikator yang dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah.

Inflasi dihitung berdasarkan perubahan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun, sebagai provinsi baru yang berdiri sejak tahun 2012, Kalimantan Utara Juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya adalah inflasi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat mempengaruhi daya

beli masyarakat, nilai tukar mata uang, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara dihitung dari inflasi dari Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor (Bulungan), yang kedua wilayah ini merupakan kota inflasi di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, perkembangan inflasi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan fluktuasi.

Besaran inflasi tahun 2020 merupakan yang terbaik dalam lima tahun terakhir, yaitu 2,47 persen. Namun pada tahun berikutnya atau tahun 2021 dan 2022 nilai inflasi Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami peningkatan menjadi 2,73 persen dan 4,74 persen. Pada 2023, inflasi Kalimantan Utara laju mengalami perbaikan.



Pada tahun 2023, Pemrov Kalimantan Utara berhasil menekan inflasi menjadi 2,44 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah dari target inflasi nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 3,0 persen ± 1 persen. Inflasi Kaltara juga merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dari Tahun ke Tahun



Nasional



10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah 2023



Sumber: BPS Kalimantan Utara, diolah Biro Adpim

BIRO ADPIM KALTARA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Bagaimana Pemprov Kaltara dapat meredam inflasi tahun 2023? Apa saja strategi dan faktor yang mendukung pencapaian tersebut? Berikut ini adalah analisis yang dapat diuraikan:

Strategi Pemprov Kalimantan Utara Mengendalikan Inflasi



Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, dan stakeholder lainnya, untuk memantau dan mengantisipasi pergerakan harga, ketersediaan pasokan, dan permintaan barang dan jasa di pasar.

Melakukan operasi pasar, yaitu menjual barang kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau kepada masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan dan perayaan nasional, seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.



Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan penyumbang inflasi terbesar di Kaltara. Pemprov Kaltara memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alat, dan bimbingan teknis kepada petani dan nelayan, serta memfasilitasi pemasaran hasil panen melalui koperasi, pasar modern, dan e-commerce.

Pemprov Kaltara juga menggalakkan penanaman tanaman hortikultura, seperti cabai dan tomat, yang sering mengalami fluktuasi harga.

Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, yang dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengurangi biaya transportasi dan logistik. Pemprov Kaltara melanjutkan pembangunan sejumlah proyek strategis, seperti jalan perbatasan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.

Mengoptimalkan penggunaan moda transportasi udara, laut, dan sungai, serta memberikan subsidi tarif kepada masyarakat.



Faktor Pendukung Pencapaian Inflasi Kalimantan Utara

- Kondisi cuaca yang kondusif, yang tidak mengganggu proses produksi dan panen sektor pertanian dan perikanan, serta tidak menyebabkan bencana alam, seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor, yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu distribusi barang dan jasa.
- Normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, yang meningkatkan permintaan dan konsumsi barang dan jasa, serta memulihkan sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pemprov Kaltara menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta melaksanakan vaksinasi massal, untuk mencegah penularan dan penyebaran virus.
- Pemahaman permintaan global terhadap komoditas batu bara, yang merupakan komoditas unggulan ekspor Kaltara. Hal ini menyebabkan penurunan harga batu bara, yang berdampak pada penurunan inflasi sektor pertambangan, yang memiliki pangsa terbesar dalam struktur perekonomian Kaltara.

Sumber: BPS Kalimantan Utara, diolah Biro Adpim



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum menyalurkan bantuan pangan tahun 2024 dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat penerima manfaat di Tanjung Selor, Bulungan. BIRO ADPIM

Pemerataan Kesejahteraan Membaik

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk.

Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

Secara umum besaran Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif, dimana dalam lima tahun terakhir besarnya berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Pada tahun 2018 hingga 2023, besaran Indeks Gini menunjukkan besaran yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik.

Jika dibandingkan dengan kondisi Nasional, maka pemerataan kesejahteraan di Kalimantan Utara lebih baik dimana pada tahun 2022 angka Indeks Gini Nasional cukup tinggi dengan capaian 0,384. BIRO ADPIM





Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum - Dr. Yansen TP, M.Si berbincang dengan investor kilang LNG di Tana Tidung dan menyatakan dukungannya terhadap investasi di sektor energi demi menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. BIRO ADPIM

Pertambangan dan Pertanian Berkontribusi Vital

*** Sempit Terkontraksi di Era Pandemi, Ekonomi Kini Terus Bertumbuh**

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19, namun secara umum capaian hingga tahun 2023 cukup baik hingga mencapai Rp147,28 triliun pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita mencapai Rp201,75 juta.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yakni 5,36 persen dan menurun hingga mengalami kontraksi di tahun 2020 dikarenakan Pandemi COVID-19. Namun dengan adanya penanganan dan pemulihan perekonomian, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang secara signifikan, yang tahun sebelumnya pertumbuhan sektor tersebut bernilai negatif.

Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan hingga menjadi 3,98 persen di tahun

2021, meningkat di tahun 2022 menjadi 5,34 persen. Namun pada 2023, melambat menjadi 4,94 persen dipengaruhi perekonomian Tiongkok yang juga tumbuh melambat sejalan dengan masih lemahnya keyakinan pelaku ekonomi dan utang rumah tangga yang tinggi. Hal ini juga terlihat dari prompt manufacturing index (PMI) Tiongkok pada periode Oktober yang masih terkontraksi. Menurut analisa BPS, kondisi tersebut berdampak terhadap melambatnya kinerja industri khususnya manufaktur sehingga mempengaruhi permintaan impor.

Selain itu, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta Israel-Palestina juga dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok global serta tingginya harga komoditas energi.

Struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan melibatkan migas dan batubara, maka lapangan usaha yang paling besar dalam struktur perekonomian Kalimantan Utara adalah pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 34,18 persen. Lapangan usaha terbesar kedua, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan 14,23 persen, dan lapangan ketiga perdagangan besar dan eceran sebesar 11,60 persen, disusul konstruksi 11,45 persen.

Keempat lapangan usaha ini mendominasi struktur PDRB 2023 dengan porsi 71,46 persen.

Adapun jika tanpa migas dan batubara, maka share pertambangan turun menjadi 7,19 persen. Sebaliknya pertanian menjadi 20,06 persen, perdagangan 16,36 persen, konstruksi 16,14 persen, dan industri pengolahan 10,82 persen. Kelima usaha ini memiliki porsi terhadap struktur PDRB Kalimantan Utara sebesar 70,57 persen.

Melihat struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, maka pertambangan dan penggalian memiliki share terhadap PDRB sebesar 34,18 persen, masih tumbuh 3,70 persen pada 2023. Adapun sektor pertanian memiliki share 14,23 persen, disusul perdagangan besar dan eceran 11,60 persen, konstruksi 11,45 persen, industri pengolahan 7,67, transportasi 7,04, dan administrasi pemerintahan dengan share 4,02 persen.

Pada 2023, terdapat sektor-sektor lain yang secara struktur, porsinya rendah, namun memiliki pertumbuhan cukup tinggi seperti pengadaan listrik dan gas tumbuh 18,58 persen, jasa keuangan dengan pertumbuhan 12,38 persen. Jasa keuangan di struktur PDRB memiliki share 1,09 persen terhadap PDRB, sedangkan pengadaan listrik dan gas hanya memiliki share 0,06 persen terhadap PDRB. **BIRO ADPIM**



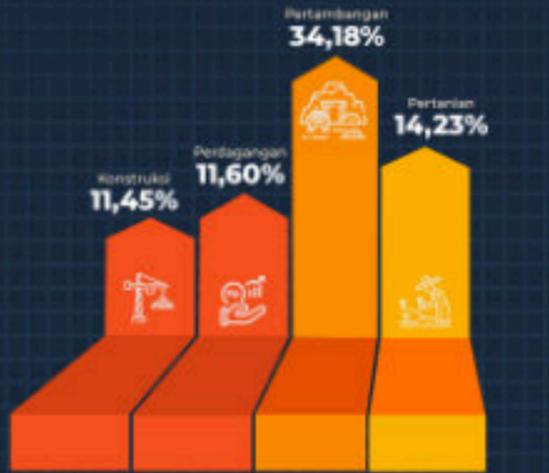
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023

2018	2019	2020
5,36%	6,89%	-1,09%
2021	2022	2023
3,98%	5,34%	4,94%

Struktur PDRB Lapangan Usaha 2023 Dengan Migas & Batubara



Total kontribusi terhadap PDRB 71,46%

Tanpa Migas dan Batubara

- Pertambangan 7,19%
- Pertanian 20,06%
- Perdagangan 16,36%
- Konstruksi 16,14%
- Industri Pengolahan 10,82%

Total kontribusi terhadap PDRB 70,57%

Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dimana setiap kategori tersebut memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu wilayah.

Sumber: BPS Kalimantan Utara, diolah **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum mengamati hasil laut yang dipasarkan pedagang Pasar Induk Bulungan di Tanjung Selor. BIRO ADPIM

PDRB Per Kapita Sentuh Rp 201,7 juta

Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2023, besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp119,41 juta dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp201,75 juta pada tahun 2023.

Sementara itu, pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2018 adalah sebesar 80,2 juta rupiah dan meningkat menjadi Rp91,42 juta pada tahun 2022.

Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga komoditas dan juga produksinya, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB Provinsi Kalimantan Utara.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan, Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan PDRB ADHB tertinggi ketiga di Indonesia yaitu sebesar Rp119,41 juta. Artinya setiap orang di Kalimantan Utara dikalkulasikan berpendapatan Rp9,95 juta per bulan.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PDRB atau pendapatan daerah per kapita tertinggi di Indonesia pada 2022. Tolehannya mencapai Rp298,35 juta. Disusul Provinsi Kalimantan Timur Rp238,7 juta.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membandingkan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Oleh karena itu, besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB, serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada penduduk di suatu wilayah.

Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BIRO ADPIM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Nilai PDRB Per Kapita

Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023

PDRB ADHB Per Kapita

2018	2019
199,41 juta	138,75 juta
2020	2021
143,53 juta	157,09 juta
2022	2023
192,59 juta	201,75 juta

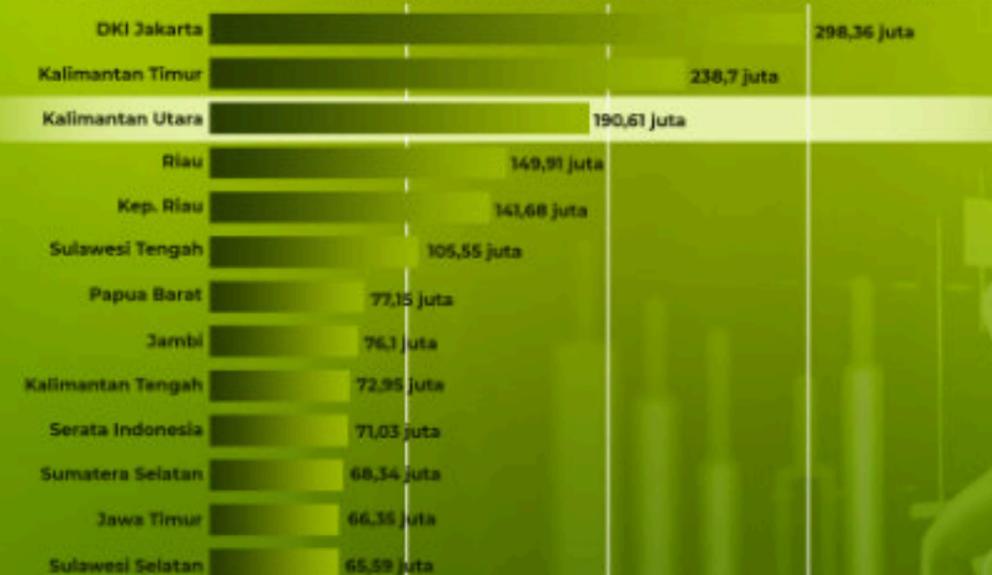
PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota

2018	2019
57,5 juta	61,62 juta
2020	2021
60,78 juta	63,2 juta
2022	2023
66,6 juta	-

LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
-1,09%	3,99%	5,32%	4,94%

PDRB per Kapita per Tahun Provinsi Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku/ADHB Seri 2010 (2022)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat 0,88 persen per tahun, yang

Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kalimantan Utara rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen per tahun. Pada tahun 2023 IPM provinsi ini telah mencapai 72,88 atau meningkat 0,67 poin (0,93 persen) dibandingkan sebelumnya (72,21) atau pada tahun 2022. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,54 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur tujuh tahun meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,06 menjadi 13,20 tahun.

Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 9,27 tahun menjadi 9,34 tahun pada 2023.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp384 ribu (4,11 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP menguraikan konsep pembangunan manusia bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat pembangunan.

“Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme-UNDP),” tutur Yansen TP.

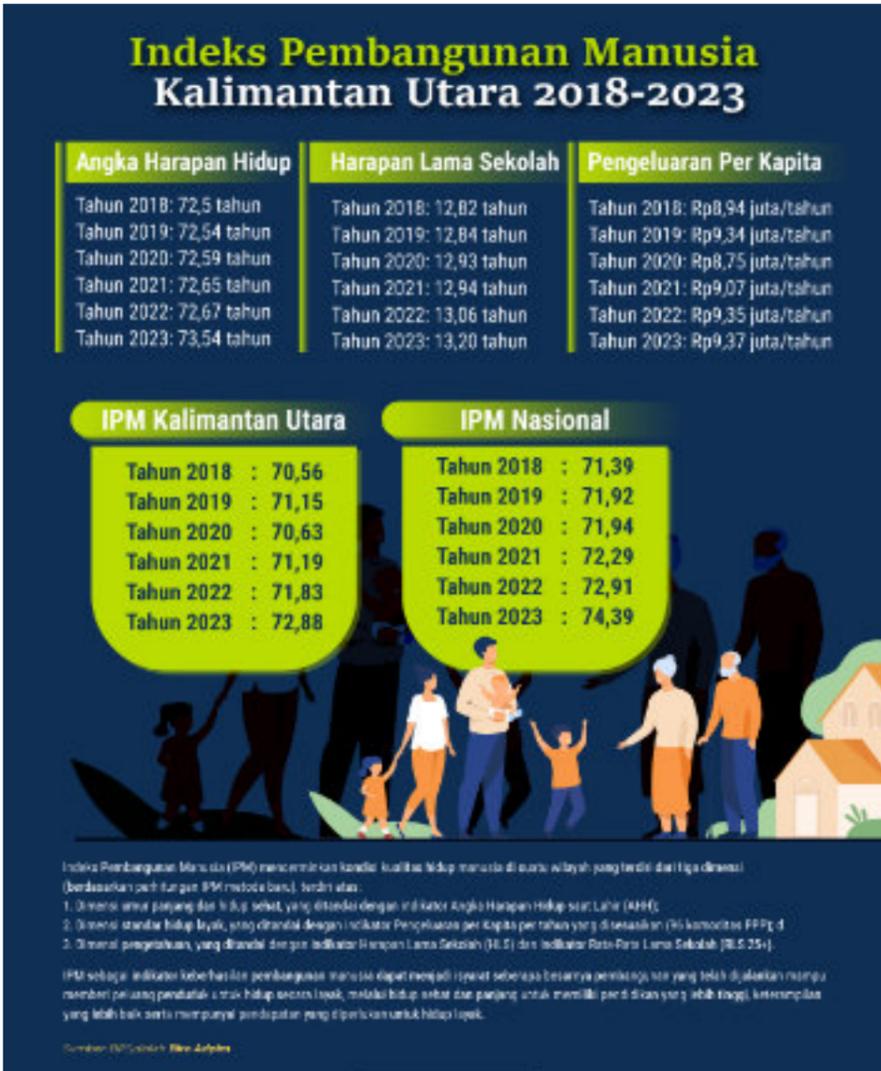
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choices). Dan, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hu berinteraksi dengan salah satu murid peserta wisuda Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Tanjung Selor, Bulungan. BIRO ADPIM

IPM Naik 0,88 Persen Per Tahun



2023, Kemiskinan Terendah dalam Lima Tahun Terakhir

Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berfluktuasi dalam lima tahun terakhir (2018-2023). Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 (Maret 2023) adalah yang terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 6,45 persen.

Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Pemprov Kalimantan Utara berkolaborasi bersama Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang serius mengentaskan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 6,45 persen, atau terjadi penurunan sekitar 0,41 poin. Diukur berdasarkan jiwa, jumlah penduduk miskin Kalimantan Utara sebanyak 50.580 jiwa pada September 2022 turun menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023.

Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen.

Penduduk Miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak seibu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di pedesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP mengungkapkan, angka positif tersebut merupakan terjemahan dari instruksi Gubernur melalui perangkat daerah yang ada dengan melakukan beberapa upaya. Misalnya melalui pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

"Pencapaian ini pun sejalan dengan visi misi berubah, maju, dan sejahtera," tuturnya. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hu menyerahkan bantuan pangan dan pemasangan listrik gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Bulungan. BIRO ADPIM



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum berinteraksi dengan petani perkebunan. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. BIRO ADPIM

Kesempatan Kerja Semakin Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Tersisa 4,01 Persen

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari besarnya yang semakin menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,15 persen per tahun.

Pada tahun 2018, besaran tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5,22 persen dan terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik hingga pada tahun 2023 indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan besaran 4,01 persen.

Turunnya TPT menandakan berkurangnya jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya kesempatan kerja sehingga banyak tenaga kerja terserap dalam dunia kerja, baik di instansi pemerintahan (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak), lapangan-lapangan kerja di bidang industri, pertanian, dan bidang lainnya.

Meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase TPT sebesar 4,97 persen dikarenakan kondisi nasional yang mengalami pandemi COVID-19 yang belum usai, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 4,33 persen.

Berdasarkan konsep International Labour Organization (ILO), pengangguran diartikan sebagai penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran bukan saja menyangkut permasalahan masalah ekonomi, namun terkait juga dengan masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya. BIRO ADPIM



Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara 2018-2023

Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja

Tahun 2018	: 17.797 orang
Tahun 2019	: 15.380 orang
Tahun 2020	: -
Tahun 2021	: -
Tahun 2022	: 16.028 orang
Tahun 2023	: 15.553 orang (Agustus)

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Tahun 2018	: 341.197 orang
Tahun 2019	: 349.157 orang
Tahun 2020	: -
Tahun 2021	: -
Tahun 2022	: 370.012 orang
Tahun 2023	: 387.823 orang (Agustus)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tahun 2018	: 5,22%
Tahun 2019	: 4,49%
Tahun 2020	: 4,97%
Tahun 2021	: 4,58%
Tahun 2022	: 4,33%
Tahun 2023	: 4,01% (Agustus)



Karakteristik Penduduk Bekerja Pada Agustus 2023

Tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 33,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,98 persen; dan Administrasi Pemerintahan sebesar 8,94 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Agustus 2022 maupun Agustus 2021.

Penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 44,47 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di non pertanian yaitu sebesar 2,80 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status pekerjaan yang mengalami kenaikan terbesar pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap, sebesar 3,48 persen.

Penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 191.287 orang (51,38 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 180.983 orang (48,62 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2023 turun 2,38 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022.

Penduduk bekerja masih didominasi berpendidikan SD ke bawah yaitu 33,03 persen. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 16,81 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2022 maupun Agustus 2023. Dibandingkan dengan Agustus 2022, tenaga kerja dengan pendidikan SMA dan SMK mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,92 persen poin, dan 0,09 persen poin.

Sumber: BPS diolah Biro Adpim



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum melakukan penanaman pohon tanda dukungan terhadap pembangunan hijau berkelanjutan di daerah dan mengurangi emisi karbon. BIRO ADPIM

Ajak Pemda di Kalimantan Terapkan Industri Hijau

Gubernur Kalimantan Utara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum mengajak Pemerintah Daerah di Kalimantan menerapkan kebijakan industri hijau berdasarkan niat untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan.

“Pengembangan ekonomi hijau tidak hanya memerlukan penetapan harga karbon yang tepat, tetapi juga perlu diiringi seperangkat kebijakan industri yang efektif,” kata Gubernur Kalimantan Utara pada Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Sinergitas Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Se-Kalimantan 2023 di Kota Tarakan, 16 November 2023.

Ia menegaskan, kebijakan industri hijau membutuhkan partisipasi seimbang antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil, terutama kelompok lingkungan.

Bentuk partisipasi seimbang itu saat ini sedang dilaksanakan di Kalimantan Utara sebagai upaya untuk menggali potensi-potensi penerimaan atau pendapatan daerah melalui pembangunan berbasis ekonomi hijau.

Gubernur mengatakan, di Kalimantan Utara saat ini tengah dibangun Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan, yang didukung dengan suplai energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Mentarang Induk, Kabupaten Malinau.

Lalu, pada aspek perdagangan karbon (carbon trade), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memulai langkah kerja sama proyek kolaborasi perdagangan karbon dalam rangka memperoleh manfaat optimal inovasi tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kerja sama itu dilakukan melalui penerapan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim pada tingkat kampung/desa/kelurahan, serta kerja sama dalam lingkup yang lebih luas dalam menembus pasar karbon internasional.

“Berbagai peluang dan upaya pemanfaatan pembangunan berbasis ekonomi hijau tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menambah penerimaan di daerah,” ujarnya. Ia menyebut, potensi besar pemanfaatan ekonomi hijau bagi peningkatan pendapatan

daerah, tidak hanya dimiliki oleh Kalimantan Utara saja.

Seluruh daerah di Kalimantan memiliki potensi yang sama, mengingat kesamaan kondisi geografis yang dimiliki dengan cakupan hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan lahan gambut yang dapat memberikan sumbangsih penurunan emisi gas rumah kaca serta manfaat potensi penerimaan daerah melalui perdagangan karbon.

“Penerimaan tambahan dari penerapan carbon price dapat dialokasikan untuk tujuan produktif atau distribusi fiskal yang lebih baik dan menguntungkan masyarakat luas,” demikian Zainal A Paliwang. **BIRO ADPIM**



Peserta balap perahu hias beradu kecepatan di Sungai Kayan pada Festival Sungai Kayan, Oktober 2023. BIRO ADPIM

Gandeng ITDC Tumbuhkan Industri Pariwisata



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum (kiri) memperlihatkan dokumen kerja sama yang dijalin dengan ITDC. BIRO ADPIM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menandatangani kerja sama bidang pariwisata. Penandatanganan Kerja Sama dilakukan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dan Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widiastuti, pada November 2023 di Bali.

“Membangun industri pariwisata tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Utara saja, untuk itu kita membutuhkan dukungan kerja sama dan investasi, maka kerja sama ini adalah awal untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah,” ujar Gubernur Zainal.

Dua pihak komitmen untuk meningkatkan investasi di industri pariwisata di Kalimantan Utara. Dalam nota kerja sama ini, disebutkan bahwa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, akan menjadi kawasan awal yang akan dikembangkan potensi kepariwisataannya.

“Kalimantan Utara memiliki banyak potensi ekonomi, salah satunya potensi pariwisata. Mulai dari keindahan alam hingga budaya yang beragam. Potensi ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kalimantan Utara,” ujar Gubernur Zainal. Gubernur Zainal meyakini, kerja sama yang baik antara Pemprov dan ITDC dapat mewujudkan Kalimantan Utara sebagai destinasi wisata nasional, bahkan kelas dunia.

Diketahui, ITDC merupakan BUMN swasta pengembang kawasan pariwisata Nusa Dua, Bali dan Mandalika, NTB. Kawasan Nusa Dua merupakan destinasi pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan akan wisata alam, kegiatan olahraga, dan *green activity* tanpa perlu keluar dari kawasan. Sedangkan Mandalika, ITDC mengembangkan kawasan dengan destinasi wisata berkonep *sportainment*. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum menyerahkan bantuan hewan ternak kepada perwakilan petani milenial di Sesayap, Tana Tidung, November 2023. BIRU ADPIM

Upayakan Penguatan Pangan Daerah dengan Bantuan Pertanian

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyalurkan bantuan bidang pertanian dan peternakan ke sejumlah kelompok tani, sebagai salah satu upaya penguatan ketahanan pangan.

"Ketahanan pangan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat," ujar Gubernur di Tana Tidung, 27 November 2023.

Penyerahan bantuan sektor pertanian dan peternakan itu dilaksanakan di halaman kantor Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung.

Gubernur mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sinergi dengan Kementerian Pertanian RI khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan penyaluran bantuan serta dukungan kegiatan sektor pertanian di daerah.

"Tentu bantuan yang diberikan kami harapkan dimanfaatkan dan dikelola dengan baik bersama kelompoknya menuju ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat," ujar dia.

Bantuan dan dukungan sektor pertanian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung meliputi sarana dan prasarana peningkatan produktivitas dan pengolahan peternakan, khususnya sapi, kambing dan sarang burung walet.

"Termasuk sarana prasarana pengolahan dan pasca panen hortikultura," ujarnya.

Gubernur menyerahkan 47 ekor kambing secara simbolis kepada Kabupaten Tana Tidung melalui Jaringan Petani Milenial Kalimantan Utara. Selain itu, menyerahkan 43 ekor kambing untuk Kabupaten Bulungan yang diterima oleh Petani Milenial Panca Agung.

Bantuan lainnya adalah Padang Pengembalaan di Tana Tidung senilai Rp329,5 juta kepada Kelompok Tani Do Asa Ngeferuen serta Pelayanan Pendataan dan Penandaan Ternak di Tana Tidung senilai Rp7,2 juta.

Adapun bantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI berupa prasarana bangsal pasca panen hortikultura diberikan kepada kelompok tani Harapan Baru, Desa Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Bantuan itu mencakup motor roda tiga, roller conveyor, meja bak cuci, meja kerja. **BIRU ADPIM**



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si dan Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus memperlihatkan berita acara pengesahan APBD 2024 yang ditetapkan sebesar Rp3,4 triliun. BIRU ADPIM

APBD 2024 Naik jadi Rp 3,4 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara 2024 disahkan sebesar Rp3,4 triliun meningkat dibandingkan APBD 2023 sebesar Rp2,9 triliun dan APBD Perubahan 2023 Rp3,1 triliun.

Kebijakan pengesahan/persetujuan APBD itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Yansen TP bersama pimpinan dan anggota legislatif Provinsi Kalimantan Utara, pada 30 November di Tanjung Selor.

APBD Kalimantan Utara 2024 yang sebesar Rp3,4 triliun mengalami kenaikan sebesar 10,8 persen dibandingkan APBD Perubahan 2023.

Kenaikan APBD 2024 disebabkan berbagai faktor antara lain peningkatan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pada 2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,5 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,2 triliun untuk Kalimantan Utara. Kenaikan APBD juga didapat dari proyeksi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Pada 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan penerimaan pajak daerah

sebesar Rp1,5 triliun dan retribusi Rp500 miliar.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP menyebut, APBD Kalimantan Utara 2024 dialokasikan untuk berbagai sektor, antara lain pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,6 triliun, meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara karena dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi daerah," kata Yansen TP.

Selain infrastruktur, pembangunan difokuskan pada sektor kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pembangunan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, fokus pada sektor pendidikan dan sosial. Pendidikan dianggap salah satu investasi penting untuk masa depan Kalimantan Utara. Sedangkan pembangunan sosial sebagai upaya terus menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ia menjelaskan, APBD punya peran

***Wagub: Jadi Daya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi**

penting sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

"Melihat kondisi itu, kami optimistis pada 2024 kita dapat meningkatkan capaian-capaian yang sudah ditetapkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," ujarnya. **BIRU ADPIM**



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kompak dengan para Ketua TPPS Kabupaten/Kota tanda komitmen menurunkan stunting menjadi 14 persen pada 2024 ini. BIRO ADPIM

Wagub: Tak Sebatas 14 Persen, tapi Menuntaskan

*Ajak Kepala Daerah Tangani Stunting dengan Pendekatan Sosial-Kultural

Provinsi Kalimantan Utara optimistis tidak hanya menurunkan stunting hingga mencapai prevalensi 14 persen pada 2024 ini, namun juga bisa menuntaskan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP meminta semua kepala daerah (Bupati/Walikota) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memaksimalkan aksi nyata penurunan stunting di daerahnya guna mencapai target prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana target capaian RPJMN 2020-2024.

Ia menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang telah digalakkan dan sampai saat ini telah menghasilkan penurunan prevalensi stunting cukup signifikan dari 27,5 persen pada tahun 2021, menjadi 22,1 persen pada tahun 2022. Namun angka tersebut masih harus diturunkan hingga 14 persen pada tahun 2024 ini.

Untuk diketahui, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 telah menjadi target pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wakil Gubernur mengajak semua pimpinan daerah diminta bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting serendah mungkin, bahkan

mencapai zero atau nol kasus di Kalimantan Utara.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. Penuntasan persoalan gizi, termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pemimpin daerah melakukan berbagai pendekatan untuk menangani stunting. Tidak hanya pendekatan legal formal dan politik, tetapi pendekatan sosial-kultural dan keagamaan juga penting digunakan. Dengan demikian, pelibatan dan kolaborasi lebih intensif lagi dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat masih penting diteruskan.

"Ke depan kita tidak berbicara penurunan tapi berbicara menuntaskan persoalan stunting tidak ada lagi karena kita ingin kesejahteraan masyarakat," demikian Yansen TP. BIRO ADPIM.



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP berbagi suka cita Natal 2023 dengan masyarakat di berbagai daerah perbatasan, salah satunya di Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan.

Perjalanan ibadah natal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ke beberapa daerah merupakan agenda yang baru pertama dilaksanakan oleh umat Kristen. Menurutnya, perjalanan ini tidak sesederhana yang dipikirkan.

Itu dilakukan sebagai penegasan bahwa daerah-daerah yang dikunjungi merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Utara walaupun berada di perbatasan dan pedalaman.

Berbagi Suka Cita Natal dengan Masyarakat Perbatasan



"Jadi kehadiran kami di sini (Krayan Tengah) adalah ungkapan pernyataan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Utara yang sangat luas ini," tutur Yansen TP.

Pelaksanaan ibadah Natal Wagub Kaltara dengan masyarakat se-Kecamatan Krayan Tengah di Desa Binuang merupakan perjalanan keempat setelah dari Bulungan dan Malinau.

Ia sangat bersyukur karena bisa berkunjung dan melaksanakan perayaan ibadah Natal ke semua wilayah, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman Nunukan dan Malinau.

"Kita ketahui dengan situasi yang ada dan sibuk tapi masih berkenan untuk bisa berkumpul bersama-sama. Saya kira ini sesuatu yang harus menjadi sikap dan gaya hidup kita. Kita tidak berjalan ke belakang, tapi kita ke depan. Kita tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan," katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat mewujudkan semangat membangun Provinsi Kalimantan Utara di manapun berada dan dalam semua situasi.

BIRO ADPIM



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si merayakan suka cita Natal 2023 bersama masyarakat pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Malinau. BIRO ADPIM

Tradisi Meja Panjang, Kekayaan Budaya Bangsa



Pesta Budaya Meja Panjang Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan disebut-sebut sebagai salah satu festival budaya terbesar di Kalimantan Utara.

Festival ini dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari upacara adat, pertunjukan seni budaya, hingga kuliner khas Dayak.

Upacara adat yang menjadi puncak acara Pesta Budaya Meja Panjang Desa Pimping adalah upacara makan bersama. Upacara ini dilakukan dengan cara menyantap berbagai macam hidangan yang disajikan di atas meja panjang yang panjangnya mencapai 100 meter.

Hidangan yang disajikan dalam upacara makan bersama ini merupakan hasil bumi dari Desa Pimping, seperti ikan, ayam, daging, sayuran, dan buah-buahan.

Hidangan-hidangan tersebut dimasak dengan cara tradisional, seperti dibakar, digoreng, dan direbus.

Upacara makan bersama ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Pimping. Upacara ini merupakan simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Desa Pimping.

Upacara ini juga merupakan wujud syukur masyarakat Desa Pimping atas hasil bumi yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

"Semoga pesta budaya yang terselenggara pada awal 2024 di Desa Pimping ini membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi semua," kata Gubernur Kalimantan Utara di lokasi Pesta Budaya Meja Panjang, 3 Januari 2024.

Baginya, tradisi ini adalah kekayaan budaya bangsa yang mesti dijaga dan dilestarikan.

"Karena di sini kita bersilaturahmi berbagai suku, agama, dan kalangan pada satu meja," ujar dia.

Pesta Budaya Meja Panjang Desa Pimping juga menjadi ajang promosi budaya suku Dayak. Festival ini menjadi sarana bagi masyarakat Dayak untuk memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat luas. Festival ini, juga menurut Gubernur, merupakan wujud kekayaan budaya Indonesia. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum berbahagia dengan masyarakat pada Pesta Budaya Desa Pimping di Kabupaten Bulungan. Pesta budaya ini selalu dinantikan pada setiap awal tahun. **BIRO ADPIM**

Jangan Persulit Masyarakat Bayar Pajak Daerah!



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH, M.Hum mengamati kendaraan operasional yang akan didistribusikan kepada UPTD Samsat di Kabupaten/Kota. **BIRO ADPIM**

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang meresmikan Sekretariat Bersama Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat (SBTPS) Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, 16 Januari 2024.

"Saya harap ini dijadikan tempat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan Samsat," kata Gubernur.

Selain meresmikan gedung, Gubernur ditemani Wakil Gubernur Dr. Yansen TP juga menyerahkan kendaraan dinas secara simbolis kepada UPTD Bapenda (Samsat) wilayah Kalimantan Utara. Sekretariat bersama ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri, Korlantas Polri, dan PT Jasa Raharja, kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah.

Selain meningkatkan koordinasi, kehadiran SBTPS turut harap melahirkan ide-ide baru yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, registrasi kendaraan, dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diharapkan dapat lebih baik.

"Hal ini karena SBTPS dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Gubernur.

Dia juga menegaskan kepada seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi

Kalimantan Utara beserta UPTD Samsat yang ada memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut Gubernur, masyarakat yang sudah berniat baik memenuhi kewajiban membayar pajak, tidak boleh dipersulit.

"Kalau bisa, membayar pajak cukup di HP, nanti petugas Samsat yang mengantarkan surat pembayarannya ke rumah, tidak perlu antre, maka ini bisa jadi percontohan di Indonesia," kata Zainal Paliwang.

SBTPS juga diharapkan mendukung pelayanan masyarakat dengan meningkatkan akurasi data kendaraan bermotor yang valid. Menurut dia, data sangat penting bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait upaya peningkatan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada 2024 di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 10.184 unit kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran PKB. Meski angka tersebut berkisar 2,71 persen dari total 375.152 unit kendaraan, dari sisi keuangan daerah harus tetap diupayakan dipungut pajak.

"Karena seharusnya PKB dari 10 ribu lebih kendaraan tersebut dapat menambah pendapatan daerah dan dimanfaatkan untuk biaya pembangunan," demikian Gubernur Kalimantan Utara.

Target Pajak Daerah jadi Rp1 Triliun di 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menaikkan target penerimaan pajak daerah 2024 menjadi Rp1,06 triliun, setelah sebelumnya pada 2023 mampu mencapai target penerimaan pajak Rp800 miliar dari target Rp700 miliar.

"Kami optimistis target baru itu dapat direalisasikan dengan melihat kondisi perekonomian nasional dan daerah yang semakin membaik," kata Gubernur.

Selain kondisi makro ekonomi 2024 yang diprediksi makin membaik, Pemprov melalui Bapenda dan jajaran UPTD Samsat yang tersebar di lima kabupaten/kota sudah mempersiapkan langkah-langkah ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah.

UPTD Samsat di lima daerah adalah ujung tombak untuk mencapai target tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat juga sangat penting. Bapenda punya program Samsat Berkunjung, Samsat Jelajah Desa, Samsat Delivery, dan Samsat Hunting, yang semuanya dilakukan untuk menghimpun penerimaan pajak daerah.

Untuk diketahui, jenis pajak daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Selain itu, terdapat dua tambahan jenis pajak daerah provinsi yaitu Pajak Alat Berat yang baru diberlakukan pada 2024 ini. Serta, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang baru akan diberlakukan pada 2025 mendatang.

Penambahan dua jenis pajak kewenangan pemerintah provinsi itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk diketahui, pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pajak daerah juga digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. **BIRO ADIM**

Cegah KKN Pengadaan Barang dan Jasa

***Pemprov Gandeng Kejati Kaltim Pahami Pejabat Pengelola Keuangan**



Jajaran Pemrov Kalimantan Utara dan dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bersiap memulai kegiatan sosialisasi pencegahan KKN pengadaan barang dan jasa di Tanjung Selor, Januari 2023. BIRO ADPIM



optimal memberi manfaat kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, 17 Januari 2023.

Kajati Kalimantan Timur, Hari Setiyono langsung memberikan materi pencegahan KKN dalam PBJ kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), para pejabat fungsional pengelola PBJ dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemrov Kalimantan Utara.

Kajati Kalimantan Timur, Hari Setiyono menyampaikan, sosialisasi pencegahan KKN terhadap penyelenggaraan PBJ sengaja dilaksanakan di awal tahun, karena bertepatan momentum awal dimulainya kegiatan proyek-proyek.

"Jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi, maka lakukan sesuai ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

Kajati juga menyampaikan, dalam hal pengadaan barang dan jasa, kejaksaan mempunyai tupoksi melakukan pengamanan terhadap proyek strategis provinsi atau daerah yang proyek itu ditetapkan oleh pemerintah daerah itu.

Kejati dapat melaksanakan fungsi pengamanan dari Intelijen apabila proyek strategis daerah sudah ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada Kejati.

Ia juga menyebut, kejaksaan mempunyai fungsi perdata dan tata usaha negara dengan melakukan pendampingan jika terjadi sengketa kontrak pekerjaan proyek.

"Kami akan melakukan pendampingan, dan mudah-mudahan upaya yang kami lakukan bisa membantu Pemda mewujudkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kekurangan dalam setiap pekerjaan proyek. Dan, ketika terjadi kekurangan, Kejati akan memberikan pemahaman.

"Ketika ada audit yang dilakukan oleh BPK, itu ada aturan main, ada klarifikasi, ada tuntutan perbendaharaan, dan apabila ada temuan, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 60 hari, harus mengembalikan," ujarnya.

Namun, jika ada proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan ada unsur melawan hukum, maka akan dilakukan proses hukum. BIRO ADPIM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur untuk meningkatkan pemahaman peraturan dan prinsip pengadaan barang dan jasa demi mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Daerah.

"Rangkaian proses PBJ harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kecurangan sehingga



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum bersama para kepala daerah sebagai perwakilan pemegang saham Bank BPD Kaltimara mengabadikan momen kebersamaan pada forum silaturahmi pemegang saham di Tanjung Selor, Bulungan, Januari 2024. BIRO ADPIM

Mampu Hadapi Tantangan Zaman

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur – Kalimantan Utara (Bankaltimara) membaur dalam forum silaturahmi dan komunikasi pemegang saham di Tanjung Selor, 23 Januari 2024.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik hadir pada forum ini.

Kepala Daerah/Perwakilan Kepala Daerah yang hadir antara lain Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Paser, Wakil Bupati Tana Tidung, Wakil Bupati Berau, Wakil Bupati Kutai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Asisten III Kabupaten Kutai Timur, Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan, Kepala BPKAD Kota Balikpapan, Kepala BPKAD Kota Samarinda. Hadir juga Direktur Utama Bankaltimara Muhammad Yamin dan Komisaris Utama Bankaltimara Zainuddin Fanani.

Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang memberi apresiasi kepada Pengurus Bankaltimara karena mampu berkembang, semakin modern, dan menjawab tantangan zaman dalam setiap pelayanannya.

Komisaris Utama Bankaltimara Zainuddin Fanani mengatakan Bankaltimara kini berstatus sebagai Bank BPD dengan jumlah modal tertinggi di Indonesia yaitu Rp7,5 triliun per 31 Desember 2023.

Modal tersebut berasal dari 17 Pemerintah

Daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (2 Pemerintah Provinsi dan 15 Pemerintah Kabupaten/Kota).

Dalam forum silaturahmi ini, Gubernur Kalimantan Utara dan Direktur Utama Bankaltimara menandatangani kerja sama digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Modal Inti Rp7,5 Triliun

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur – Kalimantan Utara (Bankaltimara) saat ini telah menempati posisi satu atau teratas kelompok bank perseroan daerah di Indonesia dengan modal inti Rp6 triliun sampai Rp14 triliun.

"Pada saat ini, Bankaltimara posisi pertama nasional, sudah memiliki modal inti sebesar Rp7,5 triliun, setelah sebelumnya empat teratas diraih oleh BPD Jabar, BPD Jatim, BPD DKI, dan BPD Jateng," kata Komisaris Utama Bankaltimara Zainuddin Fanani di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2024).

Dia menegaskan, dengan posisi modal sebesar Rp7,5 triliun, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, PT. BPD Kaltimara telah masuk dalam kriteria kelompok bank dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan 14 triliun.

Dia menyebutkan, dengan jumlah modal inti tertinggi di antara bank pembangunan daerah lainnya di Indonesia, menjadi kebanggaan jajaran pemegang saham, jajaran direksi, dan komisaris.

Permodalan Bankaltimara sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp7,5 triliun ditopang oleh penyertaan modal 17 Pemerintah Daerah yakni dua pemerintah provinsi (Pemprov) yaitu Pemrov Kalimantan Timur Rp5,1 triliun) dan Pemrov Kalimantan Utara Rp235 miliar. Jumlah sahan itu menempatkan Pemprov Kalimantan Utara sebagai pemegang saham terbesar ke-5.

Kemudian 15 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemkab Kutai Kartanegara Rp572,1 miliar; Pemkab Berau Rp304,1 miliar; Pemkab Bulungan Rp250 miliar; Pemkot Balikpapan Rp150 miliar; Pemkab Paser Rp148 miliar; Pemkab Kutai Timur Rp132,6 miliar.

Selanjutnya Pemkot Bontang Rp108,6 miliar; Pemkab Tana Tidung Rp100,1 miliar; Pemkab Kutai Barat Rp99,6 miliar; Pemkab Malinau Rp78,3 miliar; Pemkab Nunukan Rp74,3 miliar; Pemkot Tarakan Rp72,6 miliar; Pemkot Samarinda Rp64,9 miliar; Pemkab Penajam Paser Utara Rp57,6 miliar; dan Pemkab Mahakam Ulu Rp20 miliar.

Zainuddin mengatakan pada 2023, Bankaltimara mendapatkan suntikan modal sebesar Rp3,7 triliun dari 17 pemerintah daerah tersebut.

Ia menegaskan, pengurus Bankaltimara berkomitmen memanfaatkan modal tersebut untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha dan pelayanan bank ke depan.

"Utamanya meningkatkan layanan berbasis digital karena ini pilihan yang sangat baik untuk masyarakat di era saat ini," demikian Komisaris Utama Bankaltimara. **BIRO ADPIM**



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum mengabdikan momen bersama penerima manfaat bantuan pangan Pemerintah Pusat pada kegiatan penyaluran di Kantor Pos Tanjung Selor, Bulungan, Januari 2024. BIRO ADPIM

Pemprov Salurkan Bantuan Pangan Beras Pemerintah

*Tembus 30.312 Penerima Manfaat



Sebagai perwakilan Pemerintah (Pusat) di daerah, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang meluncurkan dan menyerahkan Bantuan Pangan Beras 2024 di Tanjung Selor, 29 Januari 2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi bantuan beras sebanyak 1.817,7 ton beras bagi 30.312 keluarga penerima manfaat (KPM).

Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilogram beras selama enam bulan, mulai Januari sampai Juni 2024. Penerima bantuan pangan ini adalah masyarakat miskin dan atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Penerima di Kabupaten Bulungan mencapai 5.549 KPM, Kabupaten Malinau 4.159 KPM, Kabupaten Tana Tidung 1.348 KPM, Kabupaten Nunukan 11.102 KPM, dan Kota Tarakan 8.154 KPM.

Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan pangan harus memberi manfaat yang adil dan menurutnya pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Gubernur meminta semua pihak waspada dan bersiap menghadapi resiko pemenuhan

kebutuhan pangan dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun.

Menurutnya, kurangnya daya beli terhadap pangan yang beragam dan bergizi juga merupakan dampak lain dari kemiskinan. Selain itu, El Nino juga disebutnya memberi dampak signifikan seperti kekeringan, gagal panen, dan kebakaran hutan dan lahan.

"Maka itu, bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat salah satunya melalui pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah," ujarnya.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 menyebut, Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam dan sosial, serta keadaan darurat.

"Penyaluran cadangan pangan juga dapat dilaksanakan untuk mengantisipasi, mitigasi, serta pelaksanaan pemberian bantuan pangan," demikian Gubernur Kalimantan Utara. **BIRO ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



Penerima Manfaat Bantuan Pangan Beras Pemerintah di Kalimantan Utara 2024

Bulungan

5.549 'penerima

Tarakan

8.154 'penerima

Malinau

4.159 'penerima

Tana Tidung

1.348 'penerima

Nunukan

11.102 'penerima

TOTAL PENERIMA

30.312

Bantuan Pangan Beras untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan.

Penerima Bantuan Pangan terdiri atas masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.

Masing-masing keluarga mendapatkan 10 kilogram beras selama enam bulan, mulai Januari sampai Juni 2024.

Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila penerima bantuan

- Meninggal Dunia
- Pindah Domisili
- Tidak ditemukan Alamatnya
- Sudah Mampu
- dan/atau menolak menerima bantuan.

Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti tersebut apabila memenuhi syarat anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal, keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan, atau keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.

Sumber: DPKP Kaltara & Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor Nomor 9/2023, diolah **Biro Adpim**



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan 31 ribu tablet obat-obatan dan vitamin serta bahan medis habis pakai (BMHP) berupa 11 ribu lembar masker untuk petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang akan bekerja pada pemungutan suara 14 Februari lusa.

Obat dan vitamin serta BMHP mulai didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Puskesmas.

Gubernur Kalimantan Utara menyebut logistik kesehatan yang didistribusikan mencakup Vitamin B Kompleks. Masing-masing 5.000 tablet untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Adapun Kabupaten Tana Tidung sebanyak 2.000 tablet.

Selanjutnya adalah paracetamol sebanyak 2.000 tablet untuk empat kabupaten/kota. Hanya Tana Tidung mendapat alokasi 1.000 tablet paracetamol.

Adapun masker bedah diberikan sebanyak 2.500 lembar untuk Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Tana Tidung mendapatkan 1.000 lembar masker.

"Kami juga memberikan hand sanitizer kepada kabupaten/kota," kata Gubernur usai gelaran Rapat Koordinasi Forkopimda Jelang Pemilu Serentak, di Tarakan 12 Februari 2024. Pemberian logistik obat-vitamin dan BMHP diyakini bisa menjaga daya tahan tubuh petugas TPS.

"Mereka berada dalam situasi yang melelahkan selama pelaksanaan pemilu, maka perlu memberi vitamin dan suplemen untuk menjaga kesehatan dan stamina mereka agar tetap optimal selama bertugas," kata Gubernur.

la menegaskan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, banyak petugas TPS yang mengalami kelelahan dan masalah kesehatan. Pemberian suplemen ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut.

la mengharapkan, pemberian vitamin dan obat mampu meningkatkan efisiensi kerja petugas TPS agar tetap sehat dan bugar melaksanakan tugasnya.

"Dengan menjaga daya tahan tubuh, mereka dapat bekerja dengan baik dan memastikan proses pemilu berjalan lancar," ujar dia.

Gubernur juga menegaskan bahwa pemberian vitamin dan obat-obatan merupakan komitmen pemerintah dan merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada petugas TPS yang berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan pemilu.

Pemilu Sukses-Bermartabat

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Kalimantan Utara telah berlangsung dengan sukses dan memberikan banyak pelajaran



Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum memberi dukungan moril kepada salah satu penyelenggara adhoc Pemilu 2024 di Kota Tarakan, Februari 2024. BIRU ADPIM

31 Ribu Tablet Obat-Vitamin untuk Petugas TPS

berharga.

"Berkat peran aktif seluruh pemangku kepentingan, Kalimantan Utara berhasil menggelar proses demokrasi yang berintegritas dan bermartabat," tutur Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Beberapa aspek yang menunjukkan keberhasilan Pemilu 2024 di Kalimantan Utara adalah partisipasi masyarakat pemilih. Masyarakat Kaltara menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya. Partisipasi yang aktif ini merupakan cerminan semangat demokrasi yang kuat.

Kerjasama lembaga terkait yaitu KPU, Bawaslu, aparat keamanan (TNI/Polri) serta seluruh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan baik untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar. Pengawasan ketat dan penanganan cepat atas pelanggaran memastikan integritas proses.

Sejauh masa kampanye di Kalimantan Utara, berlangsung damai. Seluruh peserta pemilu dan tim kampanye secara umum mampu menciptakan kampanye yang damai dan beradab.

"Kalimantan Utara menjadi contoh bagaimana perbedaan pandangan politik dapat disampaikan dengan santun dan menghormati satu sama lain," ujarnya.

Gubernur juga menilai, proses penghitungan suara dan pengumuman hasil dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat memantau perkembangan hasil melalui quick count lembaga survei maupun real count yang dilakukan oleh KPU.

Dengan semangat demokrasi yang kuat dan kerjasama yang baik, Kalimantan Utara membuktikan bahwa Pemilu dapat berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis. Diharapkan, hasil Pemilu 2024 membawa manfaat bagi masyarakat dan memperkuat fondasi demokrasi di Kalimantan Utara. **BIRU ADPIM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



Alokasi Obat dan BMHP kepada KPU

Bulungan

Vitamin B Kompleks : 5.000 tablet
Paracetamol : 2.000 tablet
Hand Sanitizer : 8 botol
Masker Bedah : 2.500 pcs

Tarakan

Vitamin B Kompleks : 5.000 tablet
Paracetamol : 2.000 tablet
Hand Sanitizer : 8 botol
Masker Bedah : 2.500 pcs

Malinau

Vitamin B Kompleks : 5.000 tablet
Paracetamol : 2.000 tablet
Hand Sanitizer : 7 botol
Masker Bedah : 2.500 pcs

Tana Tidung

Vitamin B Kompleks : 2.000 tablet
Paracetamol : 1.000 tablet
Hand Sanitizer : 4 botol
Masker Bedah : 1.000 pcs

Nunukan

Vitamin B Kompleks : 5.000 tablet
Paracetamol : 2.000 tablet
Hand Sanitizer : 6 botol
Masker Bedah : 2.500 pcs

*BMHP: BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Sumber: Lampiran Surat Dinkes Kaltara Nomor 400.720.1091/DINKES, diolah Biro Adpim

Membuka Akses ke “Masa Depan”: Kemajuan Jalan Poros Malinau-Krayan

Dalam upaya berkelanjutan untuk menghubungkan kawasan perbatasan di Kalimantan Utara, proyek pembangunan jalan poros Malinau-Krayan oleh Negara, terus bergerak maju. Terobosan terbaru melibatkan pemotongan bukit dan gunung yang menantang, membuka jalan bagi konektivitas yang lebih baik.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si baru-baru ini mengunjungi lokasi untuk meninjau kemajuan pekerjaan. Dalam peninjauannya, ia mengidentifikasi beberapa segmen yang menunjukkan tantangan terbesar dalam proyek ini yang sangat diharapkan dapat segera beroperasi tahun ini.

Selama kunjungan Natal di Krayan Tengah, Yansen TP tidak hanya berpartisipasi dalam perayaan tetapi juga mengambil waktu untuk memeriksa secara langsung titik-titik kritis di jalur Malinau-Krayan. Perjalanan ini, yang dilakukan dengan kendaraan khusus untuk agar bisa melalui medan berat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah Gunung Seribu, dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut.

Pembukaan jalan ini tidak hanya akan mengurangi isolasi wilayah perbatasan Krayan tetapi juga akan menjadi tonggak penting dalam menghubungkan masyarakat perbatasan dan perkotaan.

Konektivitas merupakan tantangan utama bagi penduduk perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara. Saat ini, transportasi udara perintis menjadi satu-satunya pilihan, namun dengan pembukaan jalan darat ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Yansen TP menyatakan optimisme bahwa jalan sepanjang 140 kilometer ini, jika sudah fungsional, akan memungkinkan perjalanan yang aman dan nyaman dengan waktu tempuh hanya sekitar tiga jam. Ini merupakan peningkatan signifikan dari kondisi saat ini, di mana warga harus menempuh perjalanan selama belasan jam.

“Jalan ini sudah dapat dilalui, namun kondisinya masih jauh dari ideal. Kami berharap dengan penyelesaian proyek ini, masyarakat Krayan akan dapat menikmati akses yang lebih baik dan kualitas hidup yang meningkat,” tutur Wagub Yansen TP.

Masyarakat Mesti Siap

Dalam suasana perayaan Natal, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen TP, menyampaikan pesan penting kepada warga Krayan. Ia menekankan pentingnya persiapan masyarakat



Ruas jalan perbatasan Malinau -Krayan masih dalam tahap konstruksi. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si optimistis ruas jalan yang dibangun Pemerintah Pusat ini dapat fungsional akhir 2024. BIRO ADPIM



menghadapi pembukaan akses jalan Malinau-Krayan yang akan membawa perubahan besar.

“Kegembiraan ini juga merupakan tantangan. Dengan terbukanya akses, segalanya akan menjadi lebih mudah, termasuk kedatangan orang dan barang. Kita harus berpikir cerdas dalam mengelola keuangan,” tutur Yansen.

Krayan, yang kaya akan potensi di bidang pertanian dan pariwisata, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkembang. Yansen TP menyarankan agar

masyarakat memanfaatkan lahan mereka untuk pertanian produktif seperti buah-buahan, kopi, kakao, dan sayuran.

“Saat jalan dibuka, produk-produk ini bisa dijual hingga ke Malinau, membuka peluang ekonomi baru. Jangan sampai kita memiliki banyak barang tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya,” demikian Yansen TP. BIRO ADPIM

#kaltaradihati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK
#bangga
melayani
bangsa

Calender Of Event Kaltara 2024

Februari

- Cap Gomeh - Bulungan

Maret

- Festival Musik KM 2 - Bulungan

April

- Rame Mo'o Ajo - Bulungan

Mei

- Festival Pantai Tanah Kuning 2024 - Bulungan

Juni

- Irau Bawang & Pegelaran Seni Budaya - Tana Tidung

- Open Race Kaltara Cup#5 - Bulungan

- Trail Adventure Wisata Alam - Bulungan

Juli

- Festival Musik Rock - Bulungan

- Kaltara Menyeduh - Bulungan

- Kaltara Motofest 2K24 - Bulungan

- Kicau Mania Kaltara - Bulungan

- Rally Wisata - Bulungan

- Upun Taka Fest - Tana Tidung

Agustus

- Dedur Bulungan - Bulungan

- Dendang Gema Istana - Bulungan

- Irau Tana Tidung - Tana Tidung

- Kejurnas Motoprix Region Kalimantan - Bulungan

- Malikota Fest - Malinau

September

- Jelajah Kaltara Fishing Tournament #3 - Bulungan

- Musik Alam Fest 2K24 - Bulungan

- Open Trail Gunung Rian - Tana Tidung

Oktober

- Benuanta Fest 2K24 - Bulungan

- Bulungan Sultanate Festival - Bulungan

- Cross Border - Nunukan

- Festival Sungai Kayan - Bulungan

- Hut Desa Setulang - Malinau

- Iraw Tengkeyu - Kota Tarakan

- Kaltara Begimpor - Bulungan

- Malinau Bermazmur - Malinau

November

- Irau Adat Tidung

- Borneo Bersatu - Nunukan

- Ziarah Akbar

- 22 Wali Allah - Bulungan

Desember

- Gelar Budaya

- Adat Dumud - Kota Tarakan

Sumber : Dinas Pariwisata Prov. Kaltara



#kaltaradihati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

Selamat Idulfitri

1 Syawal 1445 H/2024 M

*Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Jaga Fitrah di Hari yang Suci. Salam Kaltara di Hati.*



DR. (H.C.), H. Zainal A Paliwang, M.Hum.

Gubernur Kalimantan Utara

Dr. Yansen TP, M.Si.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara